



PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/
KEPALA BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk penegakan hukum terhadap tindak pidana bidang lingkungan hidup secara efektif dan efisien, perlu mengatur mengenai penanganan tindak pidana bidang lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 94 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil lingkungan hidup diberi wewenang untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup tentang Penanganan Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Peraturan Presiden Nomor 182 Tahun 2024 tentang Kementerian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 378);
5. Peraturan Presiden Nomor 183 Tahun 2024 tentang Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 379);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1080) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 644);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri/Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana adalah perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan.
2. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.
3. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan peristiwa yang diduga sebagai Tindak Pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur

dalam Undang-Undang mengenai kitab undang-undang hukum acara pidana.

4. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang Tindak Pidana, serta menemukan tersangka.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil Lingkungan Hidup yang selanjutnya disebut PPNS LH adalah pejabat pegawai negeri sipil yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup.
6. Tertangkap Tangan adalah tertangkapnya seseorang pada waktu:
 - a. sedang melakukan Tindak Pidana;
 - b. beberapa saat setelah Tindak Pidana dilakukan;
 - c. sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukan Tindak Pidana; atau
 - d. sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan Tindak Pidana yang menunjukkan bahwa dirinya adalah pelakunya, turut melakukan, atau membantu melakukan Tindak Pidana.
7. Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, patut diduga sebagai pelaku Tindak Pidana berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
8. Saksi adalah seseorang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, atau orang yang memiliki dan/atau menguasai data dan/atau informasi yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa guna kepentingan Penyelidikan, Penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
9. Ahli adalah seseorang yang memiliki:
 - a. pengetahuan dalam bidang tertentu yang dibuktikan dengan ijazah akademik atau sertifikat tertentu; dan/atau
 - b. pengalaman dan keterampilan khusus yang terkait dengan peristiwa pidana.
10. Laboratorium Lingkungan Hidup adalah laboratorium yang memiliki fungsi mendukung perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.
11. Penyitaan adalah tindakan penyidik untuk mengambil alih dan/atau menyimpan di bawah penguasaannya atas benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud, untuk kepentingan pembuktian dalam Penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
12. Pengeledahan adalah tindakan penyidik untuk melakukan pemeriksaan atas objek yang dimiliki atau di bawah penguasaan seseorang terkait Tindak Pidana untuk kepentingan pembuktian pada tahap Penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.
13. Penangkapan adalah tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan Tersangka, terdakwa, atau terpidana berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti untuk kepentingan Penyidikan, penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan.

14. Penahanan adalah penempatan Tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.
15. Pemblokiran adalah tindakan untuk mencegah akses penggunaan atau pemindahan sesuatu terhadap harta kekayaan, bukti kepemilikan, transaksi perbankan, akun platform daring, informasi elektronik, dokumen elektronik, atau produk administratif lainnya untuk sementara waktu yang dilakukan atas perintah penyidik, penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya.
16. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
17. Badan adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
18. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Lingkungan Hidup.
19. Kepala adalah kepala yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian Lingkungan Hidup.
20. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi kewenangan untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
21. Pemberi Bantuan Hukum adalah lembaga bantuan hukum atau organisasi kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum berdasarkan undang-undang mengenai bantuan hukum.
22. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai advokat dan/atau orang yang dapat memberikan jasa hukum baik di dalam maupun di luar pengadilan sebagai bagian dari pengabdian masyarakat untuk memberikan bantuan hukum cuma-cuma berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Penanganan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup dilakukan berdasarkan:

- a. laporan hasil pengawasan Lingkungan Hidup; atau
- b. Tertangkap Tangan.

BAB II

LAPORAN HASIL PENGAWASAN LINGKUNGAN HIDUP DAN TERTANGKAP TANGAN

Bagian Kesatu

Laporan Hasil Pengawasan Lingkungan Hidup

Pasal 3

- (1) Laporan hasil pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a disusun berdasarkan pengawasan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Dalam hal berdasarkan laporan hasil pengawasan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan adanya dugaan Tindak Pidana, laporan hasil pengawasan Lingkungan Hidup dituangkan dalam bentuk laporan kejadian.
- (3) Laporan kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. identitas pelapor;
 - b. identitas terlapor;
 - c. Saksi;
 - d. barang bukti;
 - e. uraian singkat kejadian; dan
 - f. waktu pelaporan.

Bagian Kedua Tertangkap Tangan

Pasal 4

Penanganan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berdasarkan Tertangkap Tangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III PENYELIDIKAN

Pasal 5

- (1) Penyelidikan dilaksanakan berdasarkan laporan kejadian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PPNS LH berdasarkan surat perintah.
- (3) Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit melalui:
 - a. pemeriksaan tempat kejadian perkara;
 - b. pengumpulan bahan bukti;
 - c. permintaan keterangan Saksi; dan
 - d. permintaan keterangan Ahli.
- (4) Sasaran Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. orang;
 - b. benda atau barang;
 - c. tempat;
 - d. peristiwa/kejadian; dan/atau
 - e. kegiatan.
- (5) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 6

- (1) Sebelum melaksanakan Penyelidikan, PPNS LH wajib membuat rencana Penyelidikan.
- (2) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh PPNS LH kepada atasan PPNS LH.
- (3) Rencana Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:

- a. surat perintah Penyelidikan;
- b. jumlah dan identitas PPNS LH yang akan melaksanakan Penyelidikan;
- c. objek, sasaran, dan target hasil Penyelidikan;
- d. kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam Penyelidikan;
- e. peralatan dan perlengkapan yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan;
- f. waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan Penyelidikan; dan
- g. kebutuhan anggaran Penyelidikan.

Pasal 7

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana pendukung.
- (2) Hasil pemeriksaan tempat kejadian perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 8

Pengumpulan bahan bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b dilakukan melalui:

- a. pengambilan contoh uji;
- b. pengumpulan dokumen Lingkungan Hidup, perizinan, dan dokumen lainnya terkait dengan usaha dan/atau kegiatan;
- c. pengumpulan data, informasi, dan/atau dokumen elektronik yang berasal dari hasil pemantauan dan/atau penginderaan jauh;
- d. pengumpulan peralatan, benda, dan/atau bahan yang digunakan untuk melakukan Tindak Pidana; dan/atau
- e. pengumpulan benda lain yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung dengan Tindak Pidana yang terjadi.

Pasal 9

- (1) Contoh uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a meliputi:
 - a. contoh uji limbah dan/atau bahan yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan; dan
 - b. contoh uji lain yang diperlukan untuk pembuktian Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup.
- (2) Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan metode pengambilan contoh uji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. dilakukan oleh petugas pengambil contoh uji dan didampingi oleh PPNS LH dan/atau petugas yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. didokumentasikan dalam rekaman pengambilan contoh uji untuk menjaga ketertelusuran (*chain of custody*).
- (3) Pengambilan contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk pengujian contoh uji.

- (4) Pengujian contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditujukan untuk menentukan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Hidup.
- (5) Pengujian contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bukan ditujukan untuk menentukan pemenuhan baku mutu Lingkungan Hidup dapat dilakukan oleh laboratorium yang terakreditasi.
- (6) Dalam hal diperlukan, PPNS LH dapat melakukan penyisihan contoh uji untuk dijadikan bahan bukti.
- (7) Dalam pelaksanaan pengambilan dan pengujian contoh uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH mengajukan permohonan kepada Laboratorium Lingkungan Hidup dan/atau laboratorium yang terakreditasi.

Pasal 10

- (1) PPNS LH wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada atasan PPNS LH.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. tempat dan waktu;
 - b. kegiatan Penyelidikan;
 - c. hasil Penyelidikan;
 - d. hambatan; dan
 - e. pendapat/saran.

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, PPNS LH melaksanakan gelar perkara untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan Tindak Pidana atau bukan Tindak Pidana.
- (2) Dalam hal PPNS LH memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana, PPNS LH menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.
- (3) Dalam hal PPNS LH memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan Tindak Pidana, PPNS LH menghentikan Penyelidikan.
- (4) Dalam hal PPNS LH memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Tindak Pidana, namun bukan kewenangan PPNS LH yang bersangkutan, PPNS LH yang bersangkutan melimpahkan laporan hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.
- (5) Dalam melaksanakan gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (6) Hasil koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara.

BAB IV PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

Penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup meliputi:

- a. pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka;
- b. pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka;
- c. upaya paksa;
- d. pencarian orang dan barang;
- e. penyusunan dan penyerahan berkas perkara;
- f. penyerahan Tersangka dan barang bukti; dan
- g. penghentian Penyidikan.

Pasal 13

Dalam hal hasil gelar perkara diputuskan bahwa peristiwa yang diselidiki ditindaklanjuti ke tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), atasan PPNS LH menerbitkan:

- a. surat perintah Penyidikan; dan
- b. surat perintah tugas Penyidikan.

Pasal 14

- (1) Perintah dimulainya Penyidikan ditindaklanjuti oleh atasan PPNS LH dengan menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan.
- (2) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. dasar Penyidikan;
 - b. identitas terlapor atau Tersangka;
 - c. tanggal dimulainya Penyidikan;
 - d. jenis perkara dan pasal yang disangkakan; dan
 - e. lampiran surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan yang meliputi:
 1. laporan kejadian;
 2. surat perintah Penyidikan; dan
 3. surat perintah tugas Penyidikan.
- (3) Dalam hal terlapor atau Tersangka merupakan korporasi, identitas terlapor atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama korporasi;
 - b. tempat dan tanggal pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/perjanjian serta perubahan terakhir;
 - c. tempat kedudukan;
 - d. kebangsaan korporasi;
 - e. jenis korporasi;
 - f. bentuk usaha dan/atau kegiatan; dan
 - g. identitas pengurus korporasi yang mewakili.

Pasal 15

- (1) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada Penuntut Umum dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak surat perintah Penyidikan diterbitkan.
- (2) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penuntut Umum dan ditembuskan kepada:
 - a. terlapor; dan
 - b. pelapor atau korban.
- (3) Surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Penyampaian dan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan tanda terima.

Pasal 16

- (1) Dalam hal terlapor menolak menerima tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), PPNS LH menyampaikan tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan kepada keluarga terlapor atau kepala lingkungan setempat disertai dengan tanda terima.
- (2) Dalam hal terlapor tidak berada di alamat sesuai dengan kartu tanda penduduk atau alamat domisili, tembusan surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan disampaikan kepada keluarga terlapor atau kepala lingkungan setempat disertai dengan tanda terima.

Bagian Kedua

Pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Pasal 17

- (1) Pemanggilan Saksi, Ahli, dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a dilakukan untuk diperiksa dan didengarkan keterangannya.
- (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS LH secara tertulis melalui surat panggilan.

Pasal 18

- (1) Surat panggilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) sudah diterima oleh Saksi atau Tersangka paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal kedatangan yang ditentukan.
- (2) Surat panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara langsung dan/atau secara elektronik kepada Saksi atau Tersangka.

Pasal 19

- (1) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka tidak datang, PPNS LH memanggil sekali lagi dengan meminta bantuan kepada pejabat yang berwenang untuk membawa Saksi dan/atau Tersangka kepada PPNS LH.

- (2) Dalam pelaksanaan membawa Saksi dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan:
 - a. surat panggilan kedua;
 - b. surat permohonan bantuan membawa Saksi dan/atau Tersangka kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan/atau
 - c. surat perintah membawa Saksi atau Tersangka.
- (3) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dipanggil tidak datang dengan memberikan alasan yang sah dan patut kepada Penyidik, Penyidik datang ke tempat kediamannya untuk melakukan pemeriksaan.
- (4) Dalam hal Saksi dan/atau Tersangka menghindari dari pemeriksaan, Penyidik dapat langsung mendatangi kediaman Saksi dan/atau Tersangka tanpa terlebih dahulu dilakukan pemanggilan untuk melakukan pemeriksaan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka

Paragraf 1
Umum

Pasal 20

- (1) Pemeriksaan dilakukan terhadap Saksi, Ahli, dan Tersangka.
- (2) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 21

- (1) Pemeriksaan Saksi, Ahli, dan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b dilakukan dengan Bahasa Indonesia atau bahasa yang dapat dipahami oleh Saksi, Ahli, dan Tersangka.
- (2) PPNS LH menyediakan penerjemah tersumpah bagi Saksi, Ahli, dan Tersangka yang tidak dapat memahami atau berbicara dengan Bahasa Indonesia.

Pasal 22

Dalam hal Saksi, Ahli, dan Tersangka merupakan penyandang disabilitas, perempuan, dan orang lanjut usia, PPNS LH memberikan perlakuan khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) PPNS LH dapat memeriksa Saksi dan/atau Tersangka yang berada di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan pemeriksaan Saksi dan/atau Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 2
Pemeriksaan Saksi

Pasal 24

- (1) Dalam melakukan pemeriksaan Saksi, PPNS LH dapat melakukan pengambilan sumpah jika terdapat cukup alasan atau diduga Saksi tidak akan hadir dalam pemeriksaan di pengadilan.
- (2) Pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 25

Dalam hal Saksi tidak bersedia membubuhkan tanda tangan atau cap jempol pada berita acara pemeriksaan Saksi, PPNS LH mencatat dalam berita acara pemeriksaan Saksi dengan disertai alasan.

Pasal 26

- (1) Saksi berhak memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan.
- (2) Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan oleh PPNS LH.
- (3) Saksi berhak memberikan keterangan tanpa tekanan dari siapapun atau dalam bentuk apapun.
- (4) Saksi berhak memperoleh penggantian biaya transportasi selama proses pemeriksaan.

Paragraf 3
Pemeriksaan Ahli

Pasal 27

- (1) PPNS LH dapat meminta keterangan Ahli jika diperlukan.
- (2) Sebelum memberikan keterangan Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ahli mengangkat sumpah atau mengucapkan janji di muka PPNS LH untuk memberikan keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaik-baiknya.

Paragraf 4
Pemeriksaan Tersangka

Pasal 28

- (1) Pemeriksaan Tersangka dilakukan guna mendapatkan keterangan dari Tersangka.
- (2) Dalam memeriksa Tersangka, PPNS LH wajib:
 - a. memberitahukan dengan jelas kepada Tersangka mengenai haknya; dan
 - b. menunjuk Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum bagi Tersangka.
- (3) Penunjukan Advokat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dalam hal:
 - a. Tersangka disangka melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, dan pidana penjara 15 (lima belas) tahun atau lebih; atau

- b. Tersangka disangka melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, tetapi tidak mampu atau tidak mempunyai Advokat sendiri.
- (4) Pemeriksaan terhadap Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direkam dengan menggunakan kamera pengawas selama pemeriksaan berlangsung.

Pasal 29

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat menetapkan Tersangka sebagai Saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
- (2) Dalam menetapkan Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum serta dituangkan dalam berita acara.

Pasal 30

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita acara.
- (2) Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penuntut Umum.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Tersangka tidak bersedia didampingi oleh Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum, Tersangka harus membuat pernyataan secara tertulis yang dituangkan dalam berita acara.
- (2) Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dapat mengikuti pemeriksaan Tersangka dengan melihat dan mendengarkan pemeriksaan serta menjelaskan kedudukan hukum Tersangka.
- (3) PPNS LH dapat mengeluarkan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dari pemeriksaan terhadap Tersangka jika dianggap mengganggu.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Tersangka tidak bersedia membubuhkan tanda tangan, PPNS LH mencatat dalam berita acara pemeriksaan Tersangka dengan disertai alasan.
- (2) Turunan atau salinan berita acara pemeriksaan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tersangka, Advokat, atau Pemberi Bantuan Hukum.

Pasal 33

- (1) PPNS LH dapat melakukan pemeriksaan konfrontasi mengenai persesuaian keterangan yang diberikan oleh:
 - a. Saksi dengan Saksi;
 - b. Saksi dengan Tersangka; dan/atau
 - c. Tersangka dengan Tersangka.

- (2) Hasil pemeriksaan konfrontasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Keempat
Upaya Paksa

Paragraf 1
Umum

Pasal 34

- (1) Upaya paksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c meliputi:
 - a. penetapan Tersangka;
 - b. Penangkapan;
 - c. Penahanan;
 - d. Penggeledahan;
 - e. Penyitaan;
 - f. pemeriksaan surat;
 - g. Pemblokiran; dan
 - h. larangan bagi Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia.
- (2) Upaya paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf g wajib dilengkapi dengan surat perintah dan/atau berita acara.

Paragraf 2
Penetapan Tersangka

Pasal 35

- (1) Penetapan Tersangka dilakukan PPNS LH terhadap seseorang yang diduga melakukan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (2) Pelaksanaan penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam surat penetapan Tersangka yang ditandatangani oleh atasan PPNS LH.
- (4) Surat penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. identitas Tersangka;
 - b. uraian singkat perkara; dan
 - c. hak Tersangka.

Pasal 36

- (1) Surat penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diberitahukan kepada Tersangka.
- (2) Selain kepada Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat penetapan Tersangka dapat diberitahukan kepada:
 - a. Penuntut Umum;
 - b. keluarga Tersangka;
 - c. Advokat Tersangka; dan/atau
 - d. Pemberi Bantuan Hukum Tersangka.

- (3) Dalam hal Tersangka merupakan warga negara asing, surat penetapan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

Paragraf 3
Penangkapan

Pasal 37

- (1) Penangkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b dilakukan untuk kepentingan Penyidikan.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap Tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti.
- (3) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS LH atas perintah dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Dalam melakukan Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH mengajukan permintaan bantuan Penangkapan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (5) Tembusan surat perintah Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus diberikan kepada keluarga Tersangka atau orang yang ditunjuk Tersangka atau ketua rukun warga/rukun tetangga tempat Tersangka tinggal dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak Penangkapan dilakukan.
- (6) Penangkapan dapat dilakukan paling lama 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam.
- (7) Pelaksanaan Penangkapan dituangkan dalam berita acara.

Pasal 38

Penangkapan terhadap Tersangka yang merupakan warga negara asing diberitahukan kepada perwakilan negaranya.

Pasal 39

Dalam hal Tersangka merupakan perempuan, Penangkapan dilakukan dengan menerapkan perlakuan khusus:

- a. mengupayakan Penangkapan dilakukan oleh petugas perempuan; dan
- b. memberikan ruang pelayanan khusus yang terpisah dari Tersangka laki-laki.

Pasal 40

- (1) Dalam hal Tersangka dalam keadaan sakit atau penyandang disabilitas, PPNS LH wajib meminta pertimbangan atau saran dari:
 - a. dokter atau tenaga kesehatan lainnya mengenai kondisi kesehatan;
 - b. psikolog atau psikiater mengenai kondisi kejiwaan; dan/atau
 - c. pekerja sosial mengenai kondisi psikososial.
- (2) Dalam hal pertimbangan atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memungkinkan dilakukan Penangkapan, dilakukan penundaan hingga waktu tertentu.

Paragraf 4
Penahanan

Pasal 41

- (1) Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf c, dilakukan terhadap Tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah jika Tersangka:
 - a. mengabaikan panggilan PPNS LH sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - b. memberikan informasi tidak sesuai fakta pada saat pemeriksaan;
 - c. menghambat proses pemeriksaan;
 - d. berupaya melarikan diri;
 - e. berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti;
 - f. melakukan ulang Tindak Pidana;
 - g. terancam keselamatannya atas persetujuan atau permintaan Tersangka atau Terdakwa; dan/atau
 - h. mempengaruhi Saksi untuk tidak mengatakan kejadian sebenarnya.
- (2) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS LH atas perintah dari penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan permohonan Penahanan dari PPNS LH kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Pelaksanaan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 42

- (1) Jenis Penahanan dapat berupa:
 - a. Penahanan rumah tahanan negara;
 - b. Penahanan rumah; dan
 - c. Penahanan kota.
- (2) Penahanan rumah tahanan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan di rumah tahanan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penahanan rumah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan di rumah tempat tinggal atau kediaman Tersangka dengan mengadakan pengawasan terhadapnya untuk menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan kesulitan dalam Penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup.
- (4) Penahanan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan di kota tempat tinggal atau kediaman Tersangka dengan kewajiban bagi Tersangka melapor diri kepada PPNS LH pada waktu dan tempat yang ditentukan.

Pasal 43

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, Penahanan dilakukan untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.

- (2) Apabila jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah terlampaui, PPNS LH dapat mengajukan permohonan perpanjangan Penahanan kepada Penuntut Umum untuk jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.
- (3) Dalam hal permohonan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetujui, PPNS LH melaksanakan perpanjangan Penahanan.
- (4) PPNS LH menyampaikan pemberitahuan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada:
 - a. keluarga atau wali Tersangka; atau
 - b. orang yang ditunjuk oleh Tersangka.
- (5) Dalam pelaksanaan perpanjangan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 44

- (1) PPNS LH dapat mengalihkan jenis Penahanan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Tersangka.
- (2) Pengalihan jenis Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara.
- (3) Dalam hal hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dapat dilakukan pengalihan jenis Penahanan, atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan pengalihan jenis Penahanan.
- (4) Surat pemberitahuan pengalihan jenis Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Tersangka dan keluarga Tersangka.
- (5) Pelaksanaan pengalihan jenis Penahanan Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam pelaksanaan pengalihan jenis Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 45

- (1) PPNS LH dapat menitipkan atau mengeluarkan tahanan dari rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada kepala rumah tahanan negara atau lembaga pemasyarakatan.
- (2) Pelaksanaan penitipan atau pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (3) Dalam pelaksanaan penitipan atau pengeluaran tahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

- (1) PPNS LH dapat melakukan penangguhan Penahanan berdasarkan permohonan secara tertulis dari Tersangka.

- (2) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil gelar perkara.
- (3) Dalam hal hasil gelar perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan dapat dilakukan penangguhan Penahanan, atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan penangguhan Penahanan.
- (4) Surat pemberitahuan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Tersangka dan keluarga Tersangka
- (5) Penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan atau tanpa jaminan uang atau jaminan orang berdasarkan syarat yang ditentukan.
- (6) Jaminan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diberikan oleh keluarga Tersangka, Advokat, atau orang lain yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan Tersangka sepanjang bersedia dan bertanggung jawab memikul segala risiko dan akibat yang timbul jika tahanan melarikan diri.
- (7) Pelaksanaan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (8) Dalam pelaksanaan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 47

- (1) PPNS LH berdasarkan kewenangannya dapat mencabut penangguhan Penahanan.
- (2) Dalam mencabut penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan pencabutan penangguhan Penahanan.
- (3) Surat pemberitahuan pencabutan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Tersangka.
- (4) Pelaksanaan pencabutan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam pelaksanaan pencabutan penangguhan Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 48

- (1) PPNS LH berdasarkan kewenangannya dapat melakukan pembantaran Penahanan terhadap tahanan yang menderita sakit.
- (2) Pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan surat rekomendasi dokter dari rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh PPNS LH.
- (3) Dalam melakukan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan pembantaran Penahanan.

- (4) Surat pemberitahuan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Tersangka dan keluarga Tersangka.
- (5) Pelaksanaan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam pelaksanaan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (7) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) termasuk penjagaan tahanan selama masa pembantaran.

Pasal 49

- (1) Dalam hal Tersangka tidak memerlukan rawat inap lagi berdasarkan surat rekomendasi dokter rumah sakit pemerintah atau rumah sakit yang ditunjuk oleh PPNS LH, PPNS LH dapat melakukan pencabutan pembantaran Penahanan.
- (2) Dalam melakukan pencabutan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah dan surat pemberitahuan pencabutan pembantaran Penahanan.
- (3) Surat pemberitahuan pencabutan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Tersangka.
- (4) Pelaksanaan pencabutan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (5) Dalam pelaksanaan pencabutan pembantaran Penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 50

Dalam melakukan Penahanan terhadap Tersangka yang merupakan warga negara asing, PPNS LH wajib memberitahukan kepada perwakilan negaranya dan ditembuskan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Paragraf 5 Penggeledahan

Pasal 51

- (1) Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap:
 - a. rumah atau bangunan;
 - b. pakaian;
 - c. badan;
 - d. alat transportasi;
 - e. informasi elektronik;
 - f. dokumen elektronik; dan/atau
 - g. tempat dan/atau benda lainnya yang berkaitan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup.

- (2) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri yang harus disertai dengan uraian mengenai:
 - a. lokasi yang akan digeledah; dan
 - b. dasar atau fakta yang dipercaya bahwa dalam lokasi tersebut terdapat barang bukti yang terkait dengan Tindak Pidana.
- (3) Dalam keadaan mendesak, PPNS LH dapat melakukan Penggeledahan tanpa izin dari ketua pengadilan negeri.
- (4) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. letak geografis yang sulit dijangkau;
 - b. berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti; dan/atau
 - c. situasi berdasarkan penilaian PPNS LH.
- (5) Dalam keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPNS LH paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Penggeledahan.
- (6) Dalam melaksanakan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah Penggeledahan.
- (7) Pelaksanaan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 52

- (1) Dalam melakukan Penggeledahan terhadap rumah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a, PPNS LH wajib:
 - a. menunjukkan identitas dan kartu tanda pengenal PPNS LH;
 - b. menunjukkan surat perintah dari atasan PPNS LH;
 - c. dalam keadaan tidak mendesak, menunjukkan surat izin Penggeledahan dari ketua pengadilan negeri; dan
 - d. disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2) Dalam hal Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditolak oleh pemilik/penghuni rumah atau bangunan yang akan digeledah, Penggeledahan harus disaksikan oleh kepala desa/lurah/atau sebutan lainnya atau ketua rukun warga/tetangga setempat dan 2 (dua) orang saksi.
- (3) Pelaksanaan Penggeledahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh:
 - a. PPNS LH;
 - b. Tersangka atau pemilik/penghuni rumah atau bangunan; dan
 - c. saksi.

Pasal 53

- (1) Dalam Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, PPNS LH dapat menyampaikan permohonan bantuan Penggeledahan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

- (2) Permohonan bantuan Penggeledahan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis paling sedikit memuat informasi:
 - a. objek Penggeledahan;
 - b. uraian singkat kasus;
 - c. pasal yang disangkakan; dan
 - d. pertimbangan kebutuhan Penggeledahan.
- (3) PPNS LH menyampaikan permohonan bantuan Penggeledahan kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan:
 - a. laporan kejadian;
 - b. surat perintah Penyidikan; dan
 - c. surat pemberitahuan dimulainya Penyidikan.

Paragraf 6 Penyitaan

Pasal 54

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat melakukan Penyitaan.
- (2) Dalam kondisi tidak mendesak, PPNS LH mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda yang disita.
- (3) Dalam melaksanakan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah.

Pasal 55

- (1) Dalam keadaan mendesak, PPNS LH dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.
- (2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. letak geografis yang sulit dijangkau;
 - b. Tertangkap Tangan;
 - c. barang bukti yang berpotensi rusak atau hilang;
 - d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
 - e. adanya ancaman serius terhadap lingkungan dan/atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau
 - f. situasi berdasarkan penilaian PPNS LH.
- (3) Pelaksanaan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 56

Dalam hal Tersangka, keluarga Tersangka, atau orang yang menguasai benda atau barang yang akan disita menolak menandatangani berita acara Penyitaan, PPNS LH mencatat dalam berita acara Penyitaan dengan disertai alasan.

Pasal 57

Terhadap barang bukti Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup yang telah disita dapat dilakukan tindakan:

- a. pengembalian;
- b. pemusnahan;
- c. reekspor;
- d. penyimpanan;
- e. penitipan; dan/atau
- f. titip rawat.

Pasal 58

- (1) Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf a dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Penyidikan telah dihentikan; dan/atau
 - b. tidak diperlukan untuk kepentingan Penyidikan.
- (2) Pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal diterbitkannya surat perintah pengembalian barang bukti.
- (3) Surat perintah pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh atasan PPNS LH.
- (4) Pelaksanaan pengembalian barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 59

- (1) Pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf b dapat dilakukan berdasarkan izin dari ketua pengadilan negeri setempat.
- (2) Berdasarkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH menerbitkan surat perintah.
- (3) Pelaksanaan pemusnahan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 60

- (1) Reekspor barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf c dilakukan terhadap:
 - a. limbah;
 - b. limbah bahan berbahaya dan beracun; dan/atau
 - c. bahan berbahaya dan beracun yang dilarang dipergunakan.
- (2) Reekspor barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan:
 - a. surat penetapan dari ketua pengadilan negeri setempat; dan
 - b. surat persetujuan dari Kementerian/Badan.
- (3) Pelaksanaan reekspor barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 61

- (1) PPNS LH menyisihkan sebagian barang bukti yang dimusnahkan atau direekspor untuk kepentingan pembuktian.
- (2) Pelaksanaan penyisihan sebagian barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 62

Penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf d dilakukan di tempat yang disediakan oleh PPNS LH.

Pasal 63

- (1) Penitipan barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf e dilakukan dalam hal PPNS LH tidak dapat menyediakan tempat penyimpanan barang bukti.
- (2) Dalam hal PPNS LH tidak dapat menyediakan tempat penyimpanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penitipan barang bukti dapat dilakukan di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penitipan barang bukti di rumah penyimpanan benda sitaan negara atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mengajukan permohonan penitipan barang bukti disertai dengan surat perintah dari atasan PPNS LH.
- (4) Pelaksanaan penitipan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Pasal 64

- (1) Titip rawat barang bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 huruf f dilakukan terhadap barang bukti yang memerlukan perawatan khusus dengan menitipkannya kepada pihak lain yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perawatan dan pembiayaan.
- (2) Titip rawat barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengajukan permohonan titip rawat barang bukti disertai dengan surat perintah dari atasan PPNS LH.
- (3) Pelaksanaan titip rawat barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 7

Pemeriksaan Surat

Pasal 65

- (1) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf f dilakukan terhadap surat yang diduga terkait dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, yang dikirim melalui kantor pos, perusahaan telekomunikasi, dan/atau perusahaan pengangkutan.
- (2) Pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh PPNS LH berdasarkan surat perintah dari atasan PPNS LH.
- (3) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat meminta kepada kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk menyerahkan surat yang dimaksud dan harus memberikan tanda terima.
- (4) Pelaksanaan pemeriksaan surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (5) PPNS LH memberikan tembusan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada:
 - a. kepala kantor pos, kepala perusahaan telekomunikasi, atau kepala perusahaan pengangkutan yang bersangkutan; dan
 - b. kepada ketua pengadilan negeri.

Pasal 66

- (1) Jika sesudah dibuka dan diperiksa, ternyata surat tersebut ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa, surat tersebut dilampirkan pada berkas perkara.
- (2) Apabila surat tersebut tidak ada hubungannya dengan perkara, surat tersebut ditutup kembali dan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari terhitung sejak pemeriksaan selesai, harus diserahkan kembali kepada kantor pos, perusahaan telekomunikasi, atau perusahaan pengangkutan, setelah dibubuhi cap yang berbunyi "telah dibuka oleh PPNS LH" dengan dibubuhi tanggal, tanda tangan, dan identitas PPNS LH.
- (3) PPNS LH pada setiap tahap pemeriksaan dalam proses peradilan wajib merahasiakan isi surat yang dikembalikan.

Paragraf 8 Pemblokiran

Pasal 67

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat melakukan Pemblokiran.
- (2) Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin ketua pengadilan negeri.
- (3) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. uraian Tindak Pidana yang sedang diproses;
 - b. dasar atau fakta yang menunjukkan objek yang akan diblokir memiliki relevansi dengan Tindak Pidana yang sedang diproses dan sumber perolehan dasar atau fakta tersebut; dan
 - c. bentuk dan tujuan Pemblokiran yang akan dilakukan terhadap masing-masing objek yang akan diblokir.
- (4) Dalam keadaan mendesak, Pemblokiran dapat dilaksanakan tanpa izin ketua pengadilan negeri.
- (5) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. potensi dialihkannya harta kekayaan;
 - b. adanya Tindak Pidana terkait informasi dan transaksi elektronik;
 - c. telah terjadi permufakatan dalam Tindak Pidana terorganisasi; dan/atau
 - d. situasi berdasarkan penilaian PPNS LH.
- (6) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), PPNS LH dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri setelah dilakukan Pemblokiran.

Pasal 68

- (1) Pemblokiran hanya dapat dilakukan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam hal perkara dihentikan pada tahap Penyidikan, penuntutan, atau berdasarkan putusan praperadilan mengenai tidak sahnya penetapan Tersangka, Pemblokiran harus dibuka dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja oleh pejabat yang memerintahkan Pemblokiran dengan mengeluarkan surat perintah pencabutan Pemblokiran.
- (3) Pelaksanaan Pemblokiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Paragraf 9

Larangan Bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia

Pasal 69

- (1) Untuk kepentingan Penyidikan, PPNS LH dapat melakukan pencegahan yang dilaksanakan dalam bentuk pelarangan sementara terhadap Tersangka untuk keluar wilayah Indonesia berdasarkan alasan yang sesuai dengan hukum.
- (2) Dalam melakukan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atasan PPNS LH mengajukan permohonan pelarangan Tersangka keluar wilayah Indonesia kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pencarian Orang dan Barang

Pasal 70

- (1) Pencarian orang dilakukan terhadap Tersangka dengan ketentuan:
 - a. tidak hadir dalam pemeriksaan setelah dipanggil 2 (dua) kali tanpa alasan yang patut dan wajar; dan
 - b. tidak diketahui keberadaannya berdasarkan domisili terakhir dan/atau alamat sesuai dengan kartu identitas.
- (2) Dalam hal Tersangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan, atasan PPNS LH mengajukan permohonan penerbitan daftar pencarian orang kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (3) Dalam hal Tersangka berada di luar negeri, atasan PPNS LH mengajukan penerbitan *red notice* pencarian orang kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 71

- (1) Pencarian barang dilakukan terhadap barang yang diduga berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana.

- (2) Dalam hal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditemukan, atasan PPNS LH mengajukan permohonan penerbitan daftar pencarian barang kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bagian Keenam
Penyusunan dan Penyerahan Berkas Perkara

Pasal 72

- (1) PPNS LH melakukan penyusunan berkas perkara yang meliputi dokumen hasil Penyidikan dan kelengkapan administrasi Penyidikan.
- (2) Kelengkapan administrasi Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. administrasi Penyidikan yang merupakan isi berkas perkara; dan
 - b. administrasi Penyidikan yang bukan merupakan isi berkas perkara.
- (3) Penyerahan berkas perkara dilakukan oleh PPNS LH melalui penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk kemudian secara bersama-sama menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut Umum.
- (4) Format dokumen berkas perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Badan ini.

Bagian Ketujuh
Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Pasal 73

- (1) Dalam hal berkas perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dinilai lengkap oleh Penuntut Umum, PPNS LH menyerahkan Tersangka dan barang bukti kepada Penuntut Umum dengan surat pengantar dan surat perintah dari atasan PPNS LH.
- (2) Pelaksanaan penyerahan Tersangka dan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

Bagian Kedelapan
Penghentian Penyidikan

Pasal 74

- (1) Dalam hal PPNS LH menghentikan Penyidikan, atasan PPNS LH menyampaikan surat pemberitahuan penghentian Penyidikan kepada Penuntut Umum, korban, Tersangka, atau keluarga Tersangka.
- (2) Penghentian Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena:
 - a. tidak terdapat cukup alat bukti;
 - b. peristiwa tersebut bukan merupakan Tindak Pidana;
 - c. Penyidikan dihentikan demi hukum;
 - d. terdapat putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap terhadap Tersangka atas perkara yang sama;

- e. kedaluwarsa; atau
- f. Tersangka meninggal dunia.
- (3) Dalam hal PPNS LH menghentikan Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS LH wajib melibatkan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- (4) Tersangka meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f dikecualikan terhadap Tersangka yang mewakili badan usaha.
- (5) Dalam hal Penyidikan dihentikan, atasan PPNS LH menerbitkan:
 - a. surat perintah penghentian Penyidikan;
 - b. surat ketetapan penghentian Penyidikan; dan
 - c. surat pemberitahuan penghentian Penyidikan.

Pasal 75

Dalam hal dilakukan penghentian Penyidikan, PPNS LH wajib:

- a. mengembalikan benda sitaan kepada pihak asal benda sitaan disita; dan/atau
- b. mengeluarkan Tersangka dari tahanan, dalam hal dilakukan Penahanan.

Pasal 76

- (1) Dalam hal telah dilakukan penghentian Penyidikan, PPNS LH dapat melakukan Penyidikan kembali jika:
 - a. ditemukan bukti baru; dan/atau
 - b. putusan pengadilan yang menyatakan penghentian Penyidikan tidak sah.
- (2) Dalam hal penghentian Penyidikan dicabut, atasan PPNS LH menerbitkan:
 - a. surat ketetapan pencabutan penghentian Penyidikan; dan
 - b. surat perintah Penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup.

BAB V

PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TERHADAP KORPORASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 77

- (1) Pertanggungjawaban atas Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup oleh korporasi dikenakan terhadap korporasi dan penanggung jawab korporasi.
- (2) Penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pengurus yang memiliki jabatan fungsional dalam struktur organisasi korporasi;
 - b. pemberi perintah;
 - c. pemegang kendali; atau
 - d. pemilik manfaat.

Bagian Kedua
Penyelidikan dan Penyidikan

Pasal 78

- (1) Pemanggilan terhadap korporasi pada tahap Penyelidikan dapat diwakili oleh penanggung jawab korporasi.
- (2) PPNS LH yang melakukan pemeriksaan terhadap korporasi memanggil korporasi yang diwakili oleh penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) dengan surat panggilan yang sah.
- (3) Penanggung jawab korporasi dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib hadir dalam pemeriksaan korporasi.
- (4) Dalam hal korporasi telah dipanggil secara sah namun tidak hadir, menolak hadir, atau tidak menunjuk penanggung jawab korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) untuk mewakili korporasi dalam pemeriksaan, PPNS LH menentukan salah seorang penanggung jawab korporasi untuk mewakili korporasi dan memanggil sekali lagi dengan perintah kepada petugas untuk membawa penanggung jawab korporasi secara paksa.
- (5) Ketentuan mengenai upaya paksa terhadap orang pada tahap Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 sampai dengan Pasal 69 berlaku secara mutatis mutandis terhadap upaya paksa bagi penanggung jawab korporasi.

BAB VI
PELINDUNGAN SAKSI, AHLI, DAN KORBAN

Pasal 79

- (1) Pelindungan Saksi, Ahli, dan korban, Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berkoordinasi dengan lembaga yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang yang membidangi pelindungan Saksi dan korban.
- (2) Pelindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PENGAWASAN PENYIDIKAN

Pasal 80

- (1) Pengawasan Penyidikan dilaksanakan oleh atasan PPNS LH.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap pelaksanaan Penyidikan.

BAB VIII
PENDANAAN

Pasal 81

Pendanaan dalam penanganan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; dan/atau
- b. anggaran pendapatan dan belanja daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

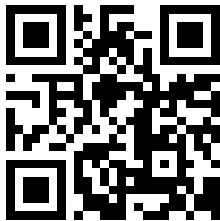
Pasal 82

Pada saat Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 789), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 83

Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri/Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

MOH JUMHUR HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 29 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 677



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/BADAN
PENGENDALIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 12 TAHUN 2026
TENTANG
PENANGANAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

FORMAT DOKUMEN BERKAS PERKARA

A. FORMAT SUSUNAN DAN KELENGKAPAN BERKAS PERKARA

1. Kulit Berkas Perkara

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” BERKAS PERKARA NO : BP-...../PPNSLH/.....20.... TINDAK PIDANA bidang Lingkungan Hidup yang terjadi di....., yaitu..... yang diduga dilakukan oleh..... berdasarkan Laporan Kejadian Nomor:..... tanggal....., dan Surat Perintah Penyidikan Nomor:.....,tanggal..... MELANGGAR Pasal Undang-Undang Nomor TERSANGKA Foto Tersangk a 4 x 6 NAMA TERSANGKA NAMA INSTANSI
--

2. Sampul Berkas Perkara

KOP SURAT INSTANSI																					
“UNTUK KEADILAN” <u>SAMPUL BERKAS PERKARA</u> Nomor: BP-...../PPNSLH/...../20..... Kejadian perkara atau tindak pidana bidang lingkungan hidup pada tanggal di yang dilaporkan pada tanggal Uraian singkat perkara atau tindak pidana bidang lingkungan hidup yang terjadi adalah Melanggar Pasal Undang-Undang tentang ----- <table border="1"><thead><tr><th rowspan="2">No. Laporan Kejadian</th><th rowspan="2">Identitas Tersangka</th><th colspan="2">Tanggal</th><th rowspan="2">Keterangan</th></tr><tr><th>Ditahan</th><th>Dikeluarkan</th></tr></thead><tbody><tr><td></td><td> 1. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Belum Pernah Dihukum </td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td> 2. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Pernah Dihukum (berapa kali) </td><td></td><td></td><td></td></tr></tbody></table> (tempat), (tanggal) Atasan PPNS LH, NIP.					No. Laporan Kejadian	Identitas Tersangka	Tanggal		Keterangan	Ditahan	Dikeluarkan		1. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Belum Pernah Dihukum					2. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Pernah Dihukum (berapa kali)			
No. Laporan Kejadian	Identitas Tersangka	Tanggal		Keterangan																	
		Ditahan	Dikeluarkan																		
	1. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Belum Pernah Dihukum																				
	2. (Nama, nama kecil, alias, jenis kelamin, tempat dan tgl. Lahir / umur, agama, kearganegaraan, tempat tinggal, pekerjaan, sudah pernah dihukum berapa kali) Pernah Dihukum (berapa kali)																				

3. Foto Tersangka

Foto 6 x 9

NAMA TERSANGKA

Umur, Tempat/Tanggal Lahir, Agama, Jenis Kelamin
....., Pekerjaan, Pendidikan, Kewarganegaraan,
Alamat Tempat Tinggal, Paspor/NIK, No.HP

4. Daftar Isi Berkas Perkara

KOP SURAT INSTANSI			
“UNTUK KEADILAN”			
<u>DAFTAR ISI BERKAS PERKARA</u> Nomor: BP/PPNSLH/...../20....			
No.	Isi Berkas	Jumlah Lembar	Keterangan
1.	Laporan Kejadian		
2.	Dokumen Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara		
a.	Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara		
b.	Berita Acara Pengambilan Foto dan/Atau Video Tempat Kejadian Perkara		
c.	Sketsa Tempat Kejadian Perkara		
3.	Dokumen Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji		
a.	Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium		
b.	Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji		
c.	Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Contoh Uji		
d.	Tanda Terima Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji		
e.	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Contoh Uji		
f.	Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Contoh Uji ke Laboratorium Lingkungan Hidup		
g.	Berita Acara Pengambilan Sertifikat Hasil Uji Dan/Atau Sisa Contoh Uji		
4.	Berita Acara Koordinasi Dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia		
5.	Surat Perintah Penyidikan		
6.	Surat Perintah Tugas Penyidikan		
7.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan		
8.	Surat Panggilan Saksi/Tersangka		
9.	Surat Permohonan Keterangan Ahli		
10.	Surat Permintaan Bantuan Membawa Saksi/Tersangka kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia		
11.	Surat Perintah Membawa Saksi/Tersangka		
12.	Dokumen Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka		
a.	Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi		
b.	Berita Acara Pemeriksaan Saksi		
c.	Berita Acara Pengangkatan Sumpah Atau Pengucapan Janji Ahli		
d.	Berita Acara Pemeriksaan Ahli		
e.	Berita Acara Pemeriksaan Tersangka		

	f.	Surat Penunjukan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum		
	g.	Surat Pernyataan Menolak untuk Didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum		
	h.	Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka		
	i.	Berita Acara Penolakan Tanda Tangan atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka		
	j.	Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konfrontasi		
13.		Dokumen Upaya Paksa		
	a.	Penetapan Tersangka		
		1). Surat Penetapan Tersangka		
		2). Hak Tersangka		
	b.	Penangkapan		
		1). Surat Permohonan Penangkapan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia		
		2). Surat Perintah Penangkapan		
		3). Berita Acara Penangkapan		
		4). Surat Permohonan Bantuan Personil Penangkapan		
	c.	Penahanan		
		1). Surat Permohonan Penahanan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia		
		2). Surat Perintah Penahanan		
		3). Berita Acara Penahanan		
		4). Surat Permohonan Bantuan Personil Penahanan		
		5). Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan kepada Jaksa Penuntut Umum		
		6). Surat Perintah Perpanjangan Penahanan		
		7). Berita Acara Perpanjangan Penahanan		
		8). Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan		
		9). Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan		
		10). Surat Permohonan Penitipan Tahanan		
		11). Surat Perintah Penitipan Tahanan		
		12). Berita Acara Penitipan Tahanan		
		13). Surat Permohonan Pengeluaran Tahanan		
		14). Surat Perintah Pengeluaran Tahanan		
		15). Berita Acara Pengeluaran Tahanan		
		16). Surat Perintah Penangguhan Penahanan		
		17). Berita Acara Penangguhan Penahanan		
		18). Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan		
		19). Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan		
		20). Surat Perintah Pembantaran Penahanan		
		21). Berita Acara Pembantaran Penahanan		

		22).	Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan		
		23).	Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan		
	d.	Penggeledahan			
		1).	Surat Permohonan Izin Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		2).	Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		3).	Surat Perintah Penggeledahan		
		4).	Berita Acara Penggeledahan		
		5).	Surat Permohonan Bantuan Personil Penggeledahan		
	e.	Penyitaan			
		1).	Surat Permohonan Izin Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		2).	Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		3).	Surat Perintah Penyitaan		
		4).	Berita Acara Penyitaan		
		5).	Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti		
		6).	Berita Acara Pengembalian Barang Bukti		
		7).	Surat Permohonan Izin Pemusnahan Barang Bukti		
		8).	Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti		
		9).	Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti		
		10).	Surat Permohonan Izin Reekspor Barang Bukti kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		11).	Surat Perintah Reekspor Barang Bukti		
		12).	Berita Acara Reekspor Barang Bukti		
		13).	Berita Acara Penyisihan Barang Bukti		
		14).	Surat Permohonan Penitipan Barang Bukti		
		15).	Surat Perintah Penitipan Barang Bukti		
		16).	Berita Acara Penitipan Barang Bukti		
		17).	Surat Permohonan Titip Rawat Barang Bukti		
		18).	Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti		
		19).	Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti		
	f.	Pemeriksaan Surat			
		1).	Surat Perintah Pemeriksaan Surat		
		2).	Berita Acara Pemeriksaan Surat		
		3).	Tanda Terima Pemeriksaan Surat		
	g.	Pemblokiran			
		1).	Surat Permohonan Izin Pemblokiran kepada Ketua Pengadilan Negeri		
		2).	Surat Permohonan Persetujuan Pemblokiran kepada Ketua Pengadilan Negeri		

		3).	Surat Permohonan Pemblokiran kepada Instansi Terkait		
		4).	Berita Acara Pemblokiran		
		5).	Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran kepada Instansi Terkait		
		6).	Berita Acara Pencabutan Pemblokiran		
	h.		Larangan Bagi Tersangka untuk Keluar Wilayah Indonesia		
			Surat Permohonan Pencegahan Ke Luar Negeri		
	14.		Permohonan Pencarian Orang		
			Surat Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Orang Kepada Kepolisian		
	15.		Permohonan Pencarian Barang		
			Surat Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Barang Kepada Kepolisian		

(tempat), (tanggal)

PPNS LH

.....
NIP.

5. Resume

KOP SURAT INSTANSI	
<u>RESUME</u>	
I.	DASAR:
1.	Pasal KUHAP
2.	Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.	Laporan Kejadian : LK/...../...../20..., tanggal
4.	Surat Perintah Penyidikan Nomor :/...../...../20..., tanggal
5.	Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor :, tanggal
6.	Surat Perintah Penyitaan Nomor:, tanggal
7.	Surat Perintah Penggeledahan Nomor:, tanggal
8.	Dst.
II.	PERKARA:
1.	Tindak pidana bidang lingkungan hidup yang dilakukan, pasal yang dilanggar, Undang-Undang Nomor Tahun tentang, waktu, dan akibat
2.	
III.	TINDAKAN YANG TELAH DIAMBIL:
1.	

IV. FAKTA-FAKTA:

1. Penanganan Tempat Kejadian Perkara (TKP)

.....

2. Pemanggilan Saksi

Dengan Surat Panggilan Nomor:, tanggal telah dipanggil beralamat di untuk didengar keterangannya sebagai, dalam perkara pidana di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang pada tanggal di yang mengakibatkan

3. Bantuan Ahli

4. Pemanggilan Tersangka

Dengan Surat Panggilan Nomor:, tanggal telah dipanggil beralamat di untuk didengar keterangannya sebagai, dalam perkara pidana di bidang lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang pada tanggal di yang mengakibatkan

5. Penangkapan

Dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor:, tanggal telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka di pada tanggal pukul WIB/WITA/WIT dengan Berita Acara Penangkapan tanggal

6. Penahanan

Dengan Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal telah dilakukan penahanan terhadap tersangka di pada tanggal pukul WIB/WITA/WIT dengan Berita Acara Penahanan tanggal

7. Pengeledahan

Dengan Surat Perintah Pengeledahan Nomor:, tanggal telah dilakukan pengeledahan terhadap tersangka di pada tanggal pukul WIB/WITA/WIT dengan Berita Acara Pengeledahan tanggal

8. Penyitaan

Dengan Surat Perintah Penyitaan Nomor:, tanggal telah dilakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa di pada tanggal pukul WIB/WITA/WIT dengan Berita Acara Penyitaan tanggal

9. Penetapan Penyitaan dari Pengadilan Negeri

.....

10. Keterangan Saksi

a. Nama :, laki – laki/perempuan, lahir di, tanggal, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, alamat tinggal

Menerangkan:

- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
- 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;

- 3) Bahwa;
 - 4) Bahwa;
 - 5) Bahwa..... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.
- b. Nama :, laki-laki/perempuan, lahir di, tanggal, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, alamat tinggal
- Menerangkan:
- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
 - 3) Bahwa;
 - 4) Bahwa;
 - 5) Bahwa..... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.
- c. dan seterusnya.
11. Keterangan Ahli
- a. Nama :, laki-laki/perempuan, lahir di, tanggal, pekerjaan, agama, kewarganegaraan, alamat tinggal
- Menerangkan:
- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenarnya;
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan para tersangka;
 - 3) Bahwa;
 - 4) Bahwa;
 - 5) Bahwa..... dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.
- b. dan seterusnya.
12. Keterangan Tersangka :
- Nama :, laki-laki/perempuan, lahir di tanggal pekerjaan, agama, kewarganegaraan, alamat tinggal:.....
- Menerangkan :
- 1) Bahwa pada saat pemeriksaan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan yang sebenar - benarnya.
 - 2) Bahwa mengerti pada saat diperiksa dan tidak ada hubungan apapun dengan tersangka;

- 3) Bahwa saat diperiksa tidak memiliki Penasehat Hukum dan tidak mampu, oleh Penyidik ditunjuk (....)... orang Penasehat Hukum dari Biro Bantuan Hukum.... masing-masing bernama..... dan.....
- 4) Bahwa
.....
- 5) Bahwa
.....
- 6) Bahwa dan dalam memberikan keterangan sama sekali tidak merasa mendapat tekanan atau paksaan dari pemeriksa, serta bersedia dipanggil kembali bila dikemudian hari diperlukan keterangannya.

V. PEMBAHASAN:

1. Analisa Kasus

.....
....
.....
.....

2. Analisa Yuridis

.....
.....
.....
.....

VI. KESIMPULAN:

.....
.....
.....

PPNS LH,

.....
NIP.

6. Daftar Saksi

KOP SURAT INSTANSI					
“UNTUK KEADILAN”					
DAFTAR SAKSI					
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Agama
1					
2					
3					
dst					
(tempat), (tanggal) PPNS LH, (nama) NIP.					

7. Daftar Ahli

KOP SURAT INSTANSI					
“UNTUK KEADILAN”					
DAFTAR AHLI					
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Agama
1					
2					
3					
dst					
PPNS LH, NIP.					

8. Daftar Tersangka

KOP SURAT INSTANSI					
“UNTUK KEADILAN”					
<u>DAFTAR TERSANGKA</u>					
No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat	Pekerjaan	Agama
1					
2					
3					
dst					
PPNS LH,					
..... NIP.					

9. Daftar Barang Bukti Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR BARANG BUKTI CONTOH UJI

No	Kode Contoh Uji	Titik Koordinat	Lokasi	Jenis	Metode Pengambilan	Jumlah	Disita		Nomor Penetapan Penyitaan dari Pengadilan
							Tanggal	Penyidik	
1									
2									
3									
dst									

PPNS LH,

.....
NIP.

10. Daftar Barang Bukti Dokumen

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

DAFTAR BARANG BUKTI DOKUMEN

No	Nama dokumen	Jumlah	Disita		Nomor Penetapan Penyitaan dari Pengadilan
			Tanggal	Penyidik	
1					
2					
3					
dst					

PPNS LH,

.....
NIP.

B. ADMINISTRASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

1. Administrasi Penyidikan yang Merupakan Isi Berkas Perkara
- a. Format Laporan Kejadian

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

LAPORAN KEJADIAN

Nomor:

Pelapor

Nama :

NIK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Umur/Jenis Kelamin :

Agama :

Kewarganegaraan :

Pekerjaan :

Alamat :

No. Telp/HP/Email :

Terlapor

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Telp./Fax.	:	
E-mail	:	
 Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:		
Nama BU/K	:	
Tempat/Tanggal Pendirian	:	
dan/atau nomor anggaran		
dasar/akta pendirian/		
peraturan/dokumen/		
perjanjian/perubahan		
terakhir		
Tempat Kedudukan BU/K:		
Kebangsaan BU/K	:	
Jenis BU/K	:	
Bentuk BU/K	:	
NIB	:	
 Saksi		
1. Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
2. Nama	:	
Alamat	:	
Pekerjaan	:	
 Barang Bukti		
1.		;
2.		;
3.		dan seterusnya
 Uraian singkat kejadian (waktu dan tempat kejadian, perbuatan, modus)		
.....		
.....		
 Demikian laporan kejadian ini dibuat dengan sebenar-benarnya, kemudian ditutup dan ditandatangani dipada tanggal bulan tahun		
Mengetahui		Pelapor,
PPNS LH,		
.....		
NIP		

1) Format Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN TEMPAT KEJADIAN PERKARA</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya ----- -----	
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ---	
1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya.	
Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: -----	
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----- 2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal (jika dalam tahap penyelidikan); ----- 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal (jika dalam tahap penyidikan). -----	
telah mendatangi, memasuki, dan melakukan pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa lokasi kegiatan/usaha/kantor/pabrik/rumah/bangunan)* di lokasi (diisi dengan alamat) untuk memeriksa kebenaran laporan yang diterima dengan melakukan tindakan sebagai berikut: -----	
1. Melakukan pemeriksaan keadaan lokasi dan/atau barang bukti; ----- 2. Melakukan kegiatan berupa pemeriksaan TKP untuk mencari dan mencatat, serta mengumpulkan barang bukti berupa.....; ----- 3. Mengambil dan membawa barang bukti berupa; ----- 4. Meminta keterangan/klarifikasi calon saksi; dan ----- 5. Kegiatan lain yang dipandang perlu oleh PPNS LH dengan persetujuan Atasan PPNS LH. -----	
Pelaksanaannya telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----	
Nama : NIK : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat :	
dengan disaksikan oleh: -----	
1. Nama :	

Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	
2. Nama :		
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

Pemilik/Penghuni Rumah/ Penanggung Jawab Usaha dan/ atau Kegiatan,	PPNS LH,
.....	
	NIP.
<u>Saksi-Saksi</u>	
1.	2.

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

2) Format Berita Acara Pengambilan Foto dan/atau Video Tempat Kejadian Perkara

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>BERITA ACARA PENGAMBILAN FOTO DAN/ATAU VIDEO</u> <u>TEMPAT KEJADIAN PERKARA</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)* saya -----.....	

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----	
1. Nama :; NIP.:	
2. Nama :; NIP.:	
3. dan seterusnya.	

Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;-----
2. Surat Perintah Tugas Nomor:, tanggal (jika dalam tahap pulbaket);---
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal (jika dalam tahap penyidikan).-----

telah melakukan pengambilan foto dan/atau video di Tempat Kejadian Perkara (TKP) berupa lokasi kegiatan/usaha/kantor/pabrik/rumah/bangunan)* di (diisi dengan alamat) untuk memeriksa kebenaran laporan yang diterima terkait dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup. -----

Adapun tata cara pengambilan foto dan/atau video adalah sebagai berikut: -

1. Data pengambilan foto dan/atau video -----
 - a. Kamera :; -----
 - b. Resolusi :; -----
 - c. Sumber cahaya :; -----
 - d. Tinggi kamera :; -----
 - e. Jarak dengan objek :; -----
 - f. Kondisi cuaca :; -----
 - g.
2. Pelaksanaan sebagaimana hasil terlampir; -----
3. Hasil pengambilan foto dicetak di atas kertas folio (F4), masing-masing dilengkapi dengan keterangan tentang objek dan data pengambilan foto dan/atau video; ---
4.

Pelaksanaan pengambilan foto dan/atau video telah disetujui/tidak disetujui/disaksikan)* oleh pemilik rumah/penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*: -----

Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:

dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Foto dan/atau Video Tempat Kejadian Perkara ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Penghuni Rumah/
Penanggung Jawab Usaha dan/
atau Kegiatan,

PPNS LH,

.....

.....

NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

)* *Pilih salah satu*

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

3) Format Sketsa Tempat Kejadian Perkara

KOP SURAT INSTANSI
“UNTUK KEADILAN” <u>SKETSA TEMPAT KEJADIAN PERKARA</u> Gambar sketsa/citra udara/citra satelit disertai legenda dan arah mata angin
Keterangan Sketsa: a. b. c. PPNS LH, NIP. Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

- c. Format Dokumen Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji
- 1) Format Surat Permohonan Bantuan Petugas Dan Uji Laboratorium

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....,.....20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium
Yth.,	
Kepala Laboratorium	
Di	
1. Dasar:	
a. Undang-Undang Nomor Tahuntentang	
b. Laporan Kejadian Nomor: tanggal	
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal	
2. Sehubungan dengan kegiatan penyelidikan/penyidikan)* yang sedang dilakukan oleh PPNS LH (<i>nama instansi</i>), kami bermaksud untuk memohon bantuan petugas dan pengujian laboratorium terhadap barang yang diduga sebagai barang bukti tindak pidana yang sedang ditangani berupa(<i>jenis contoh uji</i>) yang terjadi di.....;	
3. Kegiatan pengambilan contoh uji akan diselenggarakan pada:	
Waktu pelaksanaan	:
Lokasi	:
Jenis contoh uji	:
Baku mutu/kerusakan	:
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
Atasan PPNS LH,	
.....	
NIP	
Tembusan:	
1.	
2.	

2) Format Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG BUKTI CONTOH UJI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

1. Nama :; NIP.:

2. Nama :; NIP.:

3. dan seterusnya.

masing-masing bertugas di kantor -----,

1. Nama :; -----

2. Nama :; -----

3. dan seterusnya. -----

dari Laboratorium....., -----

berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal; -----

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal; -----

3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor: tanggal -----

Telah melakukan pengambilan contoh uji berupa: -----

N o	Kode Conto h Uji	Jenis Conto h Uji	Lokasi dan Titik Koordina t	Jumlah/Volume/Ukur an	Keterangan/Meto de Pengambilan

Dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Perwakilan/ Penanggung Jawab Kegiatan	PPNS LH,
	NIP
Saksi-Saksi	
1.	
2.	
)* Pilih salah satu	
Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).	

3) Format Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI
“UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PEMBUNGKUSAN/PENYEGELAN CONTOH UJI</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----<u>.....</u>----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: --- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. masing-masing bertugas di kantor, ----- 1. Nama :; -----

2. Nama :; -----
3. dan seterusnya. -----
dari Laboratorium....., -----

berdasarkan: -----
1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal; -----
3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor: tanggal -----

Telah melakukan pengambilan contoh uji berupa: -----

N o	Kode Conto h Uji	Jenis Conto h Uji	Lokasi dan Titik Koordina t	Jumlah/Volum e/ Ukuran	Keterangan/Wadah Pembungkus/Penyimpan an

Dengan disaksikan oleh:-----
1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pembungkusan/Penyegelan Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Perwakilan/
Penanggung Jawab Kegiatan

PPNS LH,

.....

.....
NIP

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

4) Format Tanda Terima Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

TANDA TERIMA PENGAMBILAN BARANG BUKTI CONTOH UJI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----.....

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

1. Nama :; NIP.:

2. Nama :; NIP.:

3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal; -----

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal; -----

3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor: tanggal -----

Telah menerima contoh uji berupa: -----

N o	Kode Conto h Uji	Jenis Conto h Uji	Lokasi dan Titik Koordina t	Jumlah/Volume/Ukur an	Keterangan/Wad ah Pembungkus/ Penyimpanan

Yang diserahkan oleh:-----

1. Nama

Pekerjaan

Alamat

:

:

:

:

----- Demikian Tanda Terima Pengambilan Barang Bukti Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian

ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun
sebagaimana tersebut di atas. -----

Perwakilan/
Penanggung Jawab Kegiatan

PPNS LH,

.....
NIP

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap
penyelidikan).

5) Format Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYISIHAN BARANG BUKTI CONTOH UJI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)*, saya -----.....-----

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama
dengan: -----

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal; ----
3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor:; tanggal -----

Telah melakukan penyisihan contoh uji berupa: -----

No	Kode Contoh Uji	Jenis Contoh Uji	Lokasi dan Titik Koordinat	Jumlah/Volume/ Ukuran	Keterangan/Wadah Pembungkus/ Penyimpanan

Dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :
2. Nama :
- Pekerjaan :
- Alamat :

----- Adapun jalannya pelaksanaan penyisihan barang bukti contoh uji sebagai berikut: -----

----- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Perwakilan/
Penanggung Jawab Kegiatan

PPNS LH,

.....

.....
NIP

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

6) Format Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Contoh Uji Ke
Laboratorium Lingkungan Hidup

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYERAHAN BARANG BUKTI CONTOH UJI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)*, saya -----
--

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal; ----
3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor:
.....; tanggal -----

Telah menyerahkan contoh uji berupa: -----

No	Kode Contoh Uji	Jenis Contoh Uji	Lokasi dan Titik Koordinat	Jumlah/Volume/Ukuran	Keterangan/Wadah Pembungkus/ Penyimpanan

Dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Contoh Uji tersebut selanjutnya akan dibawa ke Laboratorium untuk dilakukan
analisa lebih lanjut dan sertifikat hasil ujinya akan diserahkan kepada PPNS LH. -
--

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Barang Bukti Contoh Uji ini dibuat
dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut
di atas. -----

Pihak Laboratorium,

PPNS LH,

.....	 NIP
Saksi-Saksi	
1.	
2.	
)* Pilih salah satu	
Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).	

7) Format Berita Acara Pengambilan Sertifikat Hasil Uji dan/atau Sisa Contoh Uji

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PENGAMBILAN</u> <u>SERTIFIKAT HASIL UJI DAN/ATAU SISA CONTOH UJI</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: --- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. masing-masing bertugas di kantor, ----- 1. Nama :; ----- 2. Nama :; ----- 3. dan seterusnya. ----- dari Laboratorium....., ----- berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal; ----- -----

2. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal; -----
3. Surat Permohonan Bantuan Petugas dan Uji Laboratorium Nomor:
..... tanggal -----

Telah melakukan pengambilan sertifikat hasil uji
Nomor....tanggal....dan/atau sisa contoh uji berupa:

N o	Kode Conto h Uji	Jenis Conto h Uji	Lokasi dan Titik Koordina t	Jumlah/Volume/Ukur an	Keterangan/Wad ah Pembungkus/ Penyimpanan

Dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Sertifikat Hasil Uji dan/atau
Sisa Contoh Uji ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah
jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal,
bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Perwakilan/ PPNS LH,
Penanggung Jawab Kegiatan,

..... NIP

Saksi-Saksi

1.
2.

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

- d. Berita Acara Koordinasi Dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA KOORDINASI
PENYIDIK POLRI DAN PPNS

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)* kami: -----

I. Kementerian Lingkungan Hidup/Pusat/Balai/Instansi

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

II. Korwas PPNS Polri

- 1. Nama :; NIP.:
- 2. Nama :; NIP.:
- 3. dan seterusnya.

berdasarkan: -----

- 1. Pasal 7, Pasal 20 ayat (1), Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; -----
- 2. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
- 3. Surat Perintah Penyelidikan Nomor:, tanggal; -----
- 4. Surat Undangan Gelar Perkara Nomor:, tanggal -----

telah mengundang secara langsung dalam rangka gelar perkara dengan hasil sebagai berikut: -----

- 1. Posisi kasus/Kronologis -----
.....
.....
- 2. Pasal yang dipersangkakan -----
.....
.....
- 3. Terlapor -----
.....
.....
- 4. Tanggapan Peserta Gelar Perkara -----
.....
.....
- 5. Kesimpulan -----
.....
.....

----- Demikian Berita Acara Koordinasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya mengingat akan kekuatan Sumpah Jabatan, selanjutnya dibuat dan ditandatangani di pada Hari , Tanggal, Bulan, dan Tahun seperti tersebut di atas. -----

Atasan PPNS LH/PPNS LH,

Korwas Polri,

.....
NIP

.....
NRP

)* Pilih salah satu

Catatan: (tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan).

e. Format Surat Perintah Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
SURAT PERINTAH PENYIDIKAN	
Nomor: SP.Sidik-...../PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: untuk kepentingan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup, perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang ; 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang dilakukan oleh (orang dan/atau badan usaha) yang terjadi di, sebagaimana dimaksud

	dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
	2. membuat rencana penyidikan;
	3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d;
	4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan setiap hasilnya kepada Atasan PPNS LH.
Selesai.	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Penerima Perintah PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP

f. Format Surat Perintah Tugas Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH TUGAS PENYIDIKAN	
Nomor: SP.Gas.-...../Sidik/PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan tindak pidana bidang lingkungan hidup, maka perlu dikeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang ; 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan tugas penyidikan terhadap dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang dilakukan oleh (<i>orang dan/atau badan usaha</i>) yang terjadi di, sebagaimana dimaksud

dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;	
2. membuat rencana penyidikan;	
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;	
4. melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab serta segera melaporkan setiap hasilnya kepada Atasan PPNS LH.	
Selesai.	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Penerima Perintah PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP

g. Format Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....,.....20.....	
Nomor	: SPDP- /PPNSLH/ /20...
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan a.n.
Yth., Kepala Kejaksaan di	
1. Rujukan:	
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b dan Pasal 7 ayat (2), Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP;	
b. Undang-Undang Nomor: Tahun tentang ;	
c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal;	
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal;	
e. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: tanggal	

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal Tahun telah dimulai penyidikan atas dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, diduga dilakukan oleh terlapor/Tersangka)*:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K :
Tempat/Tanggal Pendirian:
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir
Tempat Kedudukan BU/K :
Kebangsaan BU/K :
Jenis BU/K :
Bentuk BU/K :
NIB :

3. Bersama ini dilampirkan surat-surat administrasi Penyidikan, yang terdiri dari:
- a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal;
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal;
 - c. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: tanggal
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

- 1. Kepala Kpeolisian.....
- 2. Tersangka/Terlapor)*;
- 3. Pelapor/Korban)*.

)* Pilih salah satu

h. Format Surat Panggilan Saksi/Tersangka)* Ke-1

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PANGGILAN SAKSI/TERSANGKA)* Ke-1	
Nomor: S.Pgl-...../PPNSLH/..../20...	
Pertimbangan	:guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, harus dilakukan tindakan hukum berupa pemanggilan terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)*, maka perlu diterbitkan surat panggilan.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 278 dan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 5. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: ..., tanggal
MEMANGGIL	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:	
Nama BU/K	:
Tempat/Tanggal Pendirian:	
dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/ peraturan/dokumen/ perjanjian/perubahan terakhir	
Tempat Kedudukan BU/K	:.....
Kebangsaan BU/K	:
Jenis BU/K	:
Bentuk BU/K	:
Identitas Pengurus	:

yang mewakili NIB		:			
Untuk	: menghadap kepada di Jalan pada hari, tanggal, pukul WIT, WIB, WITA)* untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang				
Atasan PPNS LH					
..... NIP					
Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIT, WIB, WITA)* telah diterima 1 (satu) lembar Surat Panggilan.					
Yang Menerima,		Yang Menyerahkan,			
.....					
PERHATIAN:					
1. Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 352 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP;					
2. Apabila tidak menghadiri sesuai Surat Panggilan Saksi/Tersangka)* ini maka Penyidik akan menerbitkan Surat Panggilan Saksi/Tersangka)* Ke- 2 serta Surat Perintah membawa Saksi/Tersangka)* untuk dihadapkan dan diperiksa oleh Penyidik.					
CATATAN: Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:					
No	Hari	Tanggal	Pukul	TANDA TANGAN	
				Yang diperiksa	PPNS LH

)* Pilih salah satu

i. Format Surat Panggilan Saksi/Tersangka)* Ke-2

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PANGGILAN SAKSI/TERSANGKA)* Ke-2

Nomor: S.Pgl-...../PPNSLH/.../20...

Pertimbangan :guna kepentingan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, harus dilakukan tindakan hukum menerbitkan surat panggilan ke-2 terhadap seseorang untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/tersangka)* karena tanpa alasan yang patut dan wajar tidak hadir sesuai surat panggilan ke-1 maka perlu diterbitkan surat panggilan.

Dasar :

1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 278 dan Pasal 327 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP
2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
5. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: ..., tanggal
6. Surat Panggilan ke-1 Nomor : S.Pgl-..../PPNSLH/..../20

MEMANGGIL

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K :

Tempat/Tanggal Pendirian:
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :

Kebangsaan BU/K :

	Jenis BU/K	:																	
	Bentuk BU/K	:																	
	Identitas Pengurus	:																	
	yang mewakili	:																	
	NIB	:																	
Untuk	: menghadap kepada di Jalan pada hari, tanggal, pukul WIT, WIB, WITA)* untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang																		
	Atasan PPNS LH																		
	 NIP																		
Pada hari ini tanggal bulan tahun pukul WIT, WIB, WITA)* telah diterima 1 (satu) lembar Surat Panggilan.																			
Yang Menerima,		Yang Menyerahkan,																	
.....																			
PERHATIAN: Barang siapa yang dengan melawan hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menurut Undang-Undang dapat dituntut berdasarkan ketentuan Pasal 352 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 KUHP																			
CATATAN: Berhubung pemeriksaan belum selesai, agar datang kembali pada:																			
<table><tr><th rowspan="2">No</th><th rowspan="2">Hari</th><th rowspan="2">Tanggal</th><th rowspan="2">Pukul</th><th colspan="2">TANDA TANGAN</th></tr><tr><th>Yang diperiksa</th><th>PPNS LH</th></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						No	Hari	Tanggal	Pukul	TANDA TANGAN		Yang diperiksa	PPNS LH						
No	Hari	Tanggal	Pukul	TANDA TANGAN															
				Yang diperiksa	PPNS LH														
)* Pilih salah satu																			

j. Format Surat Permohonan Keterangan Ahli

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN” ,20..... Nomor : P-...../PPNSLH/...../20..... Sifat : Penting Lampiran : Perihal : Permohonan Bantuan Ahli Yth. Kepala/Dekan/Nama Ahli)* (<i>Nama instansi jika ada</i>) di 1. Dasar: a. Undang-Undang Nomor Tahun tentang b. Laporan Kejadian Nomor: tanggal c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal 2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan kepada Kepala/Dekan/Saudara*) bahwa PPNS (<i>nama instansi</i>) sedang melakukan penyelidikan/penyidikan)* terkait dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di 3. Berkenaan dengan poin (2) di atas, bersama ini kami mohon bantuan Kepala/Dekan/Saudara*) dapat menugaskan (<i>Nama Ahli</i>) untuk memberikan keterangan sebagai Ahli pada: a. hari, tanggal : b. waktu : c. tempat : 4. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr./Sdri. (Nomor Hp.). 5. Demikian untuk menjadi maklum. Atasan PPNS LH, NIP Tembusan: 1. 2. Catatan: (<i>tanpa “UNTUK KEADILAN” jika dilakukan dalam tahap penyelidikan</i>).	

“UNTUK KEADILAN”

..... 20...

a.n.

.....

e. Surat Panggilan Nomor:, tanggal

Alamat :

Undang-Undang Nomor Tahun tentang

c. Surat Panggilan Nomor:, tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

)* *Pilih salah satu*

1. Format Surat Perintah Membawa Saksi/Tersangka

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH MEMBAWA SAKSI/TERSANGKA)*

Nomor: SP.Bawa-...../PPNSLH/...../20.....

Pertimbangan :guna keperluan pemeriksaan dalam rangka penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, perlu dilakukan tindakan hukum berupa membawa Saksi/Tersangka)* karena yang bersangkutan tidak hadir memenuhi panggilan penyidik dengan alasan yang tidak patut atau wajar, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 28 ayat (2), Pasal 327 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
3. Surat Panggilan Nomor:, tanggal;
4. Surat Panggilan ke-2 Nomor:, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
 NIP/Jabatan :
 2. Nama :
 NIP/Jabatan :
 3. Dan seterusnya

Untuk : 1. Membawa Saksi/Tersangka)*
 Nama :
 NIK :

Tempat/Tgl.Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Untuk didengar keterangannya sebagai Saksi/Tersangka)* dalam perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang		
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....		
3. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Membawa Saksi/Tersangka)*		
Selesai.		
		Dikeluarkan di :
		Pada tanggal :
.....		
Penerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,	
..... NIP	 NIP	
)*Pilih salah satu		

- m. Format Dokumen Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka
- 1) Format Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>BERITA ACARA PENGAMBILAN SUMPAH SAKSI</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)* saya ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan: -----	

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal -----

Telah mengambil sumpah seorang Saksi: -----

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Sesuai dengan agama yang dianutnya, dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Sehubungan dengan pasal 33 KUHP, maka untuk memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya dalam dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tentang, yang bersangkutan telah bersumpah mengucapkan lafal sumpah sesuai dengan agama yang dianutnya sebagai berikut:

“ ”

----- Selesai mengucapkan lafal sumpah, ia beserta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Saksi-Saksi,

Yang Bersumpah,

1.
2.

----- Demikian Berita Acara Pengambilan Sumpah Saksi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP.

)*Pilih salah satu

2) Format Berita Acara Pemeriksaan Saksi

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMERIKSAAN SAKSI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku bernama: -----

seorang laki-laki/perempuan)*, lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, NIK, No HP, -----

----- Ia (.....) dilakukan pemeriksaan sebagai Saksi, sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan -----

----- Atas pertanyaan PPNS yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani?
-----1. -----

2. Pada saat ini Saudara akan diperiksa sebagai Saksi sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan, apakah saudara mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? -----
----- 2. -----

3. Apakah Saudara dapat menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan saat sekarang ini? -----

4. ----- 3. -----
-----Apakah Saudara memiliki hubungan keluarga dengan terlapor/Tersangka)*? --
----- 4. -----

5. Pertanyaan 7 KAH (Siapa, Apa, Di mana, Dengan apa, Mengapa, Bagaimana, Bilamana/Kapan)? -----
----- 5. -----

6. Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini? -----
----- 6.
7. Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh pihak lain? -----
----- 7.
8. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----
----- 8.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang Diperiksa,

..... bin/binti)*

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP

)*Pilih salah satu

“UNTUK KEADILAN”

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)*, saya-----.....-----

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;-----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;-----

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

“.....”

----- Selesai mengangkat sumpah atau mengucapkan janji, ia beserta 2 (dua) orang saksi tersebut di atas membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Saksi-Saksi,	Yang Bersumpah,
1.	
2.	
----- Demikian Berita Acara Pengangkatan Sumpah atau Pengucapan Janji Ahli ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----	
PPNS LH,	
..... NIP.	
)*Pilih salah satu	

4) Format Berita Acara Pemeriksaan Ahli

KOP SURAT INSTANSI
“UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PEMERIKSAAN AHLI</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang yang mengaku bernama: ----- ----- seorang laki-laki/perempuan)*, lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, NIK, No HP, ----- ----- Ia (.....) dilakukan pemeriksaan sebagai Ahli di bidang , sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan -----

----- Atas pertanyaan PPNS yang memeriksa, yang diperiksa sesuai dengan keahliannya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut: -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah pada saat ini saudara dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani? -----

----- 1. -----

2. Pada saat ini Saudara akan diperiksa sebagai Ahli di bidang sehubungan dengan adanya dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan, apakah Saudara mengerti dan bersedia memberikan keterangan yang sebenarnya? -----

----- 2. -----

3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (2) KUHP, maka sebelum Ahli memberikan keterangan mengenai perkara yang akan dilakukan pemeriksaan oleh Penyidik wajib mengangkat sumpah. Sehubungan dengan hal tersebut, apakah Saudara bersedia mengucapkan sumpah menurut agama yang Saudara anut? -----

----- 3. -----

4. Apakah Saudara dapat menjelaskan riwayat pendidikan dan riwayat pekerjaan Saudara sampai dengan saat sekarang ini? -----

----- 4. -----

5. Apakah Saudara mempunyai ilmu dan keahlian di bidang? Jelaskan. -----

----- 5. -----

6. Apakah Saudara dapat menjelaskan berapa kali diminta pendapat sebagai Ahli baik di tingkat penyidikan maupun pada tingkat peradilan pidana? -----

----- 6. -----

7. Apa jabatan dan tugas serta tanggung jawab Saudara Ahli di dan dalam pelaksanaan tugas saudara Ahli bertanggung jawab kepada siapa? -----

----- 7. -----

8. Apakah Saudara Ahli dapat menjelaskan tugas dan fungsi di tempat Saudara bekerja? -----

----- 8. -----

9. Apakah Saudara Ahli mengenal Tersangka? Jika kenal, sejak kapan, di mana, dalam rangka apa dan apakah ada hubungan pekerjaan atau keluarga dengannya? Jelaskan. -----

----- 9.

10. (Pertanyaan yang relevan dengan dugaan tindak pidana dan keahlian yang diperiksa). -----

----- 10.

11. Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara Ahli berikan dalam pemeriksaan ini? -----

----- 11.

12. Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara Ahli merasa ditekan oleh pihak lain? -----

----- 12.

13. Apakah semua keterangan yang Saudara Ahli berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----

----- 13.

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang Diperiksa,

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP.....

*)*Pilih salah satu*

5) Format Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- -----	
NIP., bersama-sama dengan: ----- ----- -----	
NIP,masing-masing PPNS LH pada Kantor, Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:....., tanggal telah melakukan pemeriksaan terhadap seorang laki-laki/perempuan)* yang belum dikenal, mengaku bernama: ----- ----- -----	
-----Lahir di pada tanggal bulan tahun, umur, Pekerjaan, Kewarganegaraan, Alamat tempat tinggal saat pemeriksaan/tempat tinggal sesuai KTP, NIK Nomor ponsel	
Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb: Nama BU/K : Tempat/Tanggal Pendirian : dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/ peraturan/dokumen/ perjanjian/perubahan terakhir Tempat Kedudukan BU/K : Kebangsaan BU/K : Jenis BU/K : Bentuk BU/K : Identitas Pengurus : yang mewakili NIB :	
----- Ia didengar keterangannya sebagai Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor	

Tahun tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan

----- Atas pertanyaan PPNS LH yang memeriksa, yang diperiksa menjawab dan memberi keterangan sebagai berikut: -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani?

----- 1. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat. -----

2. Pada hari ini Saudara diperiksa sebagai tersangka atau tersangka BU/K yang diwakili oleh saudara)*? dalam perkara pada tanggal Apakah Saudara bersedia dan dapat memberikan keterangan dalam pemeriksaan ini? Jelaskan! -----

----- 2. Ya, saya bersedia dan dapat memberikan keterangan sebagai Tersangka/ yang mewakili Tersangka BU/K)*? dalam pemeriksaan ini.

3. ----- Apakah Saudara telah menunjuk atau memiliki advokat atau pemberi bantuan hukum untuk mendampingi Saudara dalam pemeriksaan ini? Jelaskan!

----- 3. Jika jawaban tersangka "ya", jelaskan siapa yang ditunjuk? Dari kantor pengacara apa? Dan tunjukkan surat kuasa penunjukkan pengacara (minta identitas kartu beracara pengacara dan surat kuasa).-----

4. Apakah Saudara pernah dihukum dalam perkara pidana? Jelaskan! -----

----- 4. Tidak pernah. -----

Apabila sudah pernah, disebutkan perkara Tindak Pidana , yang disidik oleh ... pada tahun ... yang dilaporkan oleh ... dengan putusan dari Pengadilan Negeri ... Nomor ... dengan hukuman ... bulan/tahun ... dan telah menjalani hukuman selama di Lembaga Pemasyarakatan

5. Sebelum pemeriksaan dilanjutkan, apakah Saudara bersedia menceritakan riwayat hidup Saudara? Jelaskan! -----

----- 5. Saya dilahirkan di pada tanggal, ayah saya bernama bekerja sebagai, ibu saya bernama bekerja sebagai, riwayat pendidikan saya: SD lulus tahun, SMP lulus tahun, SMA Lulus tahun dan pekerjaan saya adalah, jabatan saat ini adalah di -----

6.? -----

6.-----

7. Apakah dalam perkara ini Saudara akan mengajukan Saksi yang dapat menguntungkan Saudara? -----

7.-----

8. Apakah ada keterangan lain yang dapat Saudara berikan dalam pemeriksaan ini ? Jelaskan! -----

----- 8. Tidak ada. *Jika ada, jelaskan.* -----

9. Apakah dalam memberikan keterangan pada pemeriksaan ini Saudara merasa ditekan oleh pihak lain? Jelaskan! -----

----- 9. Tidak, saya tidak merasa ditekan oleh siapapun. *Jika ada, jelaskan.*

10. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini telah sesuai dan benar? -----

----- 10. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini.

Yang Diperiksa,

.....

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Advokat/
Pemberi Bantuan Hukum (jika ada)

PPNS LH,

.....

.....
NIP

)**Pilih salah satu*

6) Format Surat Penunjukan Advokat Atau Pemberi Bantuan Hukum

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....,20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Penunjukan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum
Yth.	
Pimpinan Firma Hukum/Lembaga Bantuan Hukum>Nama Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum)*	
(Nama Firma Hukum jika ada)	
di	
.....	
1. Dasar:	
a. Undang-Undang Nomor Tahun tentang	
b. Laporan Kejadian Nomor: tanggal	
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal	
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, disampaikan bahwa PPNS	
(nama instansi) sedang melakukan penyidikan terkait dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang	
..... yang terjadi di	
3. Berkenaan dengan poin (2) di atas, untuk kepentingan pemeriksaan, diminta Saudara dapat menunjuk seorang Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum untuk mendampingi Tersangka dengan identitas sebagai berikut:	
a. Nama	:
b. NIK	:
c. Tempat/Tgl. Lahir	:
d. Jenis Kelamin	:
e. Kewarganegaraan	:
f. Agama	:
g. Pekerjaan	:
h. Alamat	:
4. Pemeriksaan terhadap Tersangka tersebut akan dilaksanakan pada:	
a. hari, tanggal	:
b. waktu	:
c. tempat	:
5. Untuk keperluan koordinasi lebih lanjut dapat menghubungi Sdr./Sdri. (Nomor Hp.).	
6. Demikian untuk menjadi maklum.	

Atasan PPNS LH,	
..... NIP	
Tembusan:	
1.	
2.	
)*Pilih salah satu	

7) Format Surat Kuasa

<u>SURAT KUASA</u>	
Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Dengan ini memberikan kuasa hukum kepada:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Khusus:	
Untuk memberikan bantuan hukum di dalam proses penyidikan, kepada pemberi kuasa (tersangka) yang dipersangkakan telah melakukan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang berdasarkan:	
1. Laporan Kejadian Nomor: tanggal;	
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:.....tanggal	
3. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:tanggal.....	
Kuasa tidak diberikan hak kepada penerima kuasa untuk mengalihkannya kepada orang lain (tanpa hak substitusi), kecuali atas persetujuan pemberi kuasa dan/atau persetujuan Penyidik yang telah menunjuk penerima kuasa sebagai Penasehat Hukum berdasarkan Surat Penunjukan Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum	

Demikian Surat Kuasa ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dan dapat digunakan untuk kepentingan penyidikan.

.....,20.....
Yang memberi kuasa,

Yang menerima kuasa

Meterai

NIP

8) Format Surat Pernyataan Menolak Untuk Didampingi Advokat Atau Pemberi Bantuan Hukum

**SURAT PERNYATAAN MENOLAK UNTUK DIDAMPINGI
ADVOKAT ATAU PEMBERI BANTUAN HUKUM**

Saya yang bertandatangan di bawah ini adalah:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dengan ini menyatakan bahwa saya diperiksa sebagai TERSANGKA oleh PPNS LH (*nama instansi*) dan tidak bersedia didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum pada tingkat pemeriksaan dalam perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang berdasarkan Laporan Kejadian Nomor: tanggal Sebelum pemeriksaan dimulai, saya telah diberitahukan terkait hak-hak Tersangka, terutama hak untuk didampingi Advokat atau Pemberi Bantuan Hukum dalam pemeriksaan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan ataupun paksaan dari pihak manapun dan saya membubuhkan tanda tangan di atas meterai Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Mengetahui,
Pernyataan,
PPNS LH

.....,20.....
Yang Membuat

Tersangka,

Meterai

NIP

9) Format Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN ATAS BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal: ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal: ----- telah melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang mengaku bernama: - ----- ----- seorang *laki-laki/perempuan, lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, NIK, No HP, dan ----- Yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan ----- Dengan disaksikan oleh: ----- ----- 1. Nama : Pekerjaan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan : Alamat : Uraian pelaksanaan pemeriksaan sebagai berikut: ----- Tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka hari tanggal bulan tahun dengan
--

didampingi oleh advokat bernama dari kantor hukum, yang selanjutnya setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan setelah dibaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut bersama-sama dengan Advokatnya, Tersangka keberatan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, sehingga dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. -----

----- Setelah Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Diperiksa,

..... bin/binti)*

----- Demikian Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ini dibuat dengan sebenar- benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP.....

Saksi-saksi,

.....

)*Pilih salah satu

- 10) Format Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN ATAS BERITA ACARA PENOLAKAN TANDA TANGAN BERITA ACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal: ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal ----- telah melakukan penangkapan terhadap seseorang yang mengaku bernama: ----- seorang *laki-laki/perempuan, lahir di pada tanggal bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan, alamat tempat tinggal, NIK, No HP, dan ----- Yang bersangkutan telah dilakukan pemeriksaan dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, sesuai dengan Laporan Kejadian dan Surat Perintah Penyidikan ----- Dengan disaksikan oleh: ----- 1. Nama : Pekerjaan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan : Alamat : Uraian pelaksanaannya sebagai berikut: ----- Tersangka telah dilakukan pemeriksaan dan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka pada tanggal dengan didampingi oleh Advokat bernama dari kantor hukum, yang selanjutnya setelah dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan Tersangka dan setelah dibaca kembali Berita Acara Pemeriksaan tersebut bersama-sama dengan advokatnya, Tersangka keberatan untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan,	

sehingga dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan Tersangka. -----

Setelah dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan, yang bersangkutan kembali keberatan untuk menandatangani, selanjutnya dibuatkan Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan. -----

----- Demikian Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Penolakan Tanda Tangan Atas Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenar- benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP

Saksi-saksi,

.....

)*Pilih salah satu

11) Format Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konfrontasi

KOP SURAT INSTANSI
“UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA HASIL PEMERIKSAAN KONFRONTASI</u> <u>SAKSI/TERSANGKA)* DENGAN SAKSI/TERSANGKA)*</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan bersama-sama dengan: ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal terkait Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-undang Nomor Tahun tentang, sehubungan dengan Laporan Kejadian

Nomor:, tanggal, telah melakukan konfontrasi seorang saksi/tersangka)* yang mengaku bernama: -----

----- 1.
seorang laki-laki/perempuan)*, lahir di pada tanggal
bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan
....., alamat tempat tinggal, NIK, No
HP, dan -----

dengan seorang saksi/tersangka)* yang mengaku bernama: -----

----- 2.
seorang laki-laki/perempuan)*, lahir di pada tanggal
bulan tahun, pekerjaan, kewarganegaraan
....., alamat tempat tinggal, NIK, No
HP

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan masing-masing: -----

1. bin/binti)*, tanggal; -----

2. bin/binti)*, tanggal; -----

Pemeriksaan dilakukan dengan cara masing-masing duduk berhadap-
hadapan. ----

----- Atas pertanyaan PPNS yang memeriksa, masing-masing yang
diperiksa menjawab dan memberikan keterangan sebagai berikut: -----

PERTANYAAN

JAWABAN

1. Apakah Saudara pada hari ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani,
serta bersedia memberikan keterangan atas hal yang di pertanyakan
dengan jujur dan benar? -----

-----1a. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia
memberikan keterangan atas hal yang di pertanyakan dengan
jujur dan benar.

-----1b. Ya, pada hari ini saya dalam keadaan sehat dan bersedia
memberikan keterangan atas hal yang di pertanyakan dengan
jujur dan benar.

2. Apakah Saudara-Saudara sudah saling kenal satu sama lain? -----

----- 2a.

----- 2b.

3. Apakah Saudara-Saudara masih tetap pada keterangan-keterangan yang
telah diberikan dalam Berita Acara Pemeriksaan masing-masing? -----

----- 3a. Masih tetap.

----- 3b. Masih tetap.

4. Bagaimana jawaban Saudara dengan keterangan Saudara tersebut di atas?

----- 4a.

----- 4b.

5. Apakah keterangan yang telah Saudara-Saudara berikan tersebut di atas
adalah sebenar-benarnya? -----

----- 5a. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. -----

----- 5b. Sudah benar dan saya berikan tanpa ada paksaan. -----

6. Adakah keterangan lain yang akan ditambahkan sehubungan dengan
pemeriksaan konfrontasi ini? -----

----- 6a. Tidak ada lagi. -----

----- 6b. Tidak ada lagi. -----

7. Apakah semua keterangan yang Saudara berikan dalam pemeriksaan ini
telah sesuai dan benar? -----

----- 7a. Ya, benar. -----

----- 7b. Ya, benar. -----

----- Setelah Berita Acara Hasil Pemeriksaan Konfrontasi ini dibuat, kemudian dibacakan kembali kepada yang diperiksa dan yang diperiksa membenarkan semua keterangan yang telah diberikan tersebut di atas. Untuk menguatkan keterangannya, yang diperiksa membubuhkan tanda tangannya di bawah ini. -----

Yang Diperiksa,

1. bin/binti)*

2. bin/binti)*

----- Demikian Berita Acara Konfrontasi ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

PPNS LH,

.....
NIP.....

)**Pilih salah satu*

- n. Format Dokumen Upaya Paksa
 - 1) Penetapan Tersangka
 - a) Format Surat Penetapan Tersangka

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
SURAT PENETAPAN TERSANGKA	
Nomor: S.Tap-...../PPNSLH/...../20....	
Menimbang	: Berdasarkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan terhadap Saksi-Saksi, Ahli, Barang Bukti, dan Gelar Perkara, diperoleh keterangan yang cukup dan menyakinkan, bahwa patut diduga keras telah melakukan perbuatan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup dan oleh sebab itu maka statusnya ditetapkan sebagai Tersangka, sehingga diperlukan untuk mengeluarkan Surat Penetapan ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 28, Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 142, Pasal 235 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang 3. Laporan Kejadian Nomor: tanggal 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: ... tanggal 5. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan Nomor: tanggal 6. Berita Acara Saksi dan Berita Acara Keterangan Ahli; 7. Hasil Gelar Perkara tanggal
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: 1. status seseorang dengan identitas: - Nama : - NIK : - Tempat/Tgl Lahir : - Jenis Kelamin : - Agama : - Kewarganegaraan : - Pekerjaan : - Pendidikan Terakhir : - Alamat sesuai KTP :
Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb: - Nama BU/K : - Tempat/Tanggal : - Pendirian dan/atau nomor anggaran dasar/akta pendirian/peraturan/dokumen/	

perjanjian/perubahan terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :

Kebangsaan BU/K :

Jenis BU/K :

Bentuk BU/K :

Identitas Pengurus yang :

Mewakili

2. menjadi Tersangka dalam dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3. Tersangka memiliki hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-perundangan sebagaimana terlampir.
4. Surat Penetapan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di :

Pada tanggal :

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

b) Hak Tersangka

LAMPIRAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA
HAK-HAK TERSANGKA

Sesuai dengan Pasal 142 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Tersangka berhak:

- a. segera menjalankan pemeriksaan;
- b. memilih, menghubungi, dan mendapat pendampingan Advokat dalam setiap pemeriksaan;
- c. diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya mengenai apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya;
- d. diberitahu mengenai haknya;
- e. memberikan atau menolak untuk memberikan keterangan berkaitan dengan sangkaan yang dikenakan kepadanya;
- f. setiap waktu mendapat bantuan Penerjemah atau juru bahasa;
- g. mendapat Jasa Hukum dan/atau Bantuan Hukum;
- h. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan perwakilan negaranya bagi Tersangka yang berkewarganegaraan asing;
- i. menunjuk perwakilan suatu negara untuk dihubungi;
- j. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan dokter untuk kepentingan pemeriksaan kesehatan atas dirinya;
- k. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan rohaniwan;

- l. menghubungi, berkomunikasi, dan menerima kunjungan Keluarga, kerabat, atau hubungan lain secara langsung atau melalui perantara Advokat;
- m. mengirim dan menerima surat dari dan kepada Advokat dan Keluarga Tersangka;
- n. mengajukan permohonan mekanisme Keadilan Restoratif;
- o. mengusahakan dan mengajukan Saksi dan/atau orang yang memiliki keahlian khusus;
- p. mengajukan tuntutan Ganti Rugi dan Rehabilitasi; dan/atau
- q. bebas dari penyiksaan, intimidasi, perbuatan tidak manusiawi atau merendahkan harkat dan martabat manusia selama proses hukum yang dijalankan berdasarkan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tersangka,

PPNS LH

.....

.....
NIP.

2) Penangkapan

- a) Format Surat Permohonan Penangkapan Kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia

KOP SURAT INSTANSI

"UNTUK KEADILAN"

..... 20...

Nomor : P-...../PPNSLH/..../20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Penangkapan Tersangka a.n.....

Yth.:

Kepala Kepolisian.....

Di

.....

1. Dasar:

- a. Pasal 1 angka 14 dan angka 32, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf b, Pasal 90 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94, Pasal 108 dan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP
- b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
- d. Sirat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal
- e. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal

2. Bahwa terdapat kekhawatiran Tersangka berupaya melarikan diri, menghambat proses penyidikan, merusak atau menghilangkan barang

bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, dimohon Saudara dapat memberikan persetujuan penangkapan kepada PPNS Lingkungan Hidup terhadap Tersangka atas nama:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

- a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
- b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
- c. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

b) Format Surat Perintah Penangkapan

KOP PUSAT/BALAI	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>SURAT PERINTAH PENANGKAPAN</u>	
Nomor: SP.Kap-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: untuk kepentingan perlu melakukan tindakan hukum berupa penangkapan terhadap seseorang yang karena perbuatannya dan/atau keadaannya diduga melakukan tindak pidana berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 7 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 93 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 94, Pasal 95, dan Pasal 96 Undang-Undang

Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana;

2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun
tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
.....;
5. Surat Perintah Tugas Nomor: tanggal.....;
6. Surat Penetapan Tersangka Nomor: tanggal;
7. Surat Persetujuan Penangkapan dari Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia
Nomor.....tanggal.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk : 1. Melakukan penangkapan terhadap:
Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti, diduga
keras telah melakukan Tindak Pidana bidang
Lingkungan Hidup berupa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor
Tahun tentang

2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
s.d.....;
4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan
penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada
Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara
Penangkapan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangkapan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.	
Yang Menerima, Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga	Yang Menyerahkan,
.....	

c) Format Berita Acara Penangkapan

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PENANGKAPAN</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal: ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal: ----- 3. Surat Persetujuan Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....----- 4. Surat Perintah Penangkapan Nomor:; tanggal: ----- telah melakukan penangkapan terhadap seseorang: ----- Nama : NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan :
Alamat :

Orang tersebut ditangkap karena berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti diduga sebagai Tersangka dalam Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa....., yang terjadi di.....pada tanggal, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang..... -----

Adapun jalannya pelaksanaan penangkapan adalah sebagai berikut: -----

.....
.....
.....
.....

----- Demikian Berita Acara Penangkapan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka,

PPNS LH,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

d) Format Surat Permohonan Bantuan Personil Penangkapan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
..... 20...	
Nomor	: P-...../PPNSLH/..../20....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Bantuan Personil Penangkapan Tersangka a.n.....
Yth.:	
Kepala Kepolisian.....	
Di	
1. Dasar:	
a.	Pasal 1 angka 14 dan angka 32, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf b, Pasal 90 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 94, Pasal 108 dan Pasal 361 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP
b.	Undang-Undang Nomor Tahun tentang
c.	Laporan Kejadian Nomor: tanggal
d.	Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal
e.	Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal
f.	Surat Persetujuan Penangkapan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....
2.	Bahwa terdapat kekhawatiran Tersangka berupaya melarikan diri, menghambat proses penyidikan, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan personil mendampingi PNSLH melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap Tersangka atas nama:
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
	dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3.	Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
a.	Laporan Kejadian Nomor:... tanggal
b.	Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal

- c. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.....

Tembusan:

1.
2.

3) Penahanan

- a) Format Surat Permohonan Penahanan Kepada Penyidik
Kepolisian Negara Republik Indonesia

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20...

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Persetujuan Penahanan
Tersangka a.n.....

Yth.:

Kepala Kepolisian.....

Di

.....

1. Dasar:

- a. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
- b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal
- e. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal

2. Bahwa terdapat kekhawatiran Tersangka berupaya melarikan diri, menghambat proses penyidikan, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, dimohon Saudara dapat memberikan persetujuan penahanan kepada PPNS Lingkungan Hidup terhadap Tersangka atas nama:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup yang terjadi di, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang		
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:		
a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal		
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal		
c. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal		
4. Demikian untuk menjadi maklum.		
Atasan PPNS LH,		
.....		
NIP.....		
Tembusan:		
1.		
2.		

b) Format Surat Perintah Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/..../20....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan dan berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh bukti yang cukup, tersangka diduga keras telah melakukan Tindak Pidana yang dapat dikenakan penahanan serta Tersangka dikhawatirkan akan melarikan diri, atau merusak/menghilangkan barang bukti dan/atau melakukan ulang tindak pidana, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor Tahun tentang 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
5. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal
6. Surat Persetujuan Penahanan dari Penyidik Kepolisian
Negara Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk : 1. melakukan penahanan terhadap Tersangka:
Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

yang berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga
keras telah melakukan Tindak Pidana bidang
Lingkungan Hidup berupa ... yang terjadi di....
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-
Undang Nomor Tahun tentang

2. menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara
..... Jalan ... selama 20 (dua puluh) hari terhitung
mulai tanggal..... sampai dengan tanggal
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan
s.d.....;
4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan
penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada
Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara
Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah,
PPNS LH

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

.....
NIP

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.

Yang Menerima,
Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga)*

Yang Menyerahkan,

.....

.....
.....

)* Pilih salah satu

c) Format Berita Acara Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>BERITA ACARA PENAHANAN</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal: ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal: ----- 3. Surat Persetujuan Penahanan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; ----- 4. Surat Perintah Penahanan Nomor:; tanggal: ----- telah melakukan penahanan terhadap tersangka: ----- Nama : NIK : Tempat/Tgl.Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : yang berdasarkan bukti yang cukup diduga telah melakukan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana	

dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
..... -----

Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara di/ rumah
kediaman tersangka di/ kota kediaman tersangka di selama
20 (dua puluh) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan
tanggal -----

Uraian secara singkat jalannya penahanan Tersangka adalah sebagai berikut:
.....
.....
.....

Kesehatan fisik Tersangka sebelum dimasukkan ke dalam ruang tahanan
dalam keadaan sehat/sakit. -----

----- Demikian Berita Acara Penahanan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di..... pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana
tersebut di atas-----

Tersangka,

PPNS LH,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

) Pilih salah satu*

d) Format Surat Permohonan Bantuan Personil Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20...

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Personil Penahanan
Tersangka a.n.....

Yth.:
Kepala Kepolisian....
Di
.....

1. Dasar:
 - a. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP;
 - b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal
 - e. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal
 - f. Surat Persetujuan Penahanan dari Penyidik Kepolisian Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....
2. Bahwa terdapat kekhawatiran Tersangka berupaya melarikan diri, menghambat proses penyidikan, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan/atau mengulangi tindak pidana, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan personil mendampingi PPNSLH melakukan upaya paksa berupa penahanan terhadap Tersangka atas nama:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl.Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.... yang terjadi di, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
 - c. Surat Penetapan Tersangka Nomor:, tanggal
4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

NIP

Tembusan:

1.

2.

e) Format Surat Permohonan Perpanjangan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20...

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Perpanjangan
 Penahanan Tersangka a.n.....

Yth.:
Kepala Kejaksaan..... ;
Di
.....

1. Dasar:

a. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang

c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal

d. Sirat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal

e. Surat Persetujuan Penahanan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....

f. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal

2. Bersama ini diberitahukan bahwa waktu penahanan tersangka atas nama:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

akan segera berakhir, sedangkan pemeriksaan belum selesai, sehingga perlu perpanjangan penahanan guna penyelesaian penyidikan dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa Yang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Sehubungan dengan hal tersebut diminta bantuan Saudara untuk melakukan perpanjangan penahanan selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - c. Surat Persetujuan dari Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor.....tanggal.....;
 - d. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal
 - e. Berita Acara Penahanan atas nama tersangka
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

f) Format Surat Perintah Perpanjangan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>SURAT PERINTAH PERPANJANGAN PENAHANAN</u>	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/.... /20.....	
Pertimbangan	: pemeriksaan dalam rangka penyidikan belum selesai, sedangkan waktu perpanjangan penahanan Tersangka akan segera berakhir dan perlu melanjutkan perpanjangan penahanan, sehingga perlu dikeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1.Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang 3. Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal 4. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kejaksaan Nomor, tanggal atas nama tersangka
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan :

	Jabatan :
	3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. Melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka:
	Nama :
	NIK :
	Tempat/Tgl.lahir :
	Jenis Kelamin :
	Kewarganegaraan :
	Agama :
	Pekerjaan :
	Alamat :
	dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang ;
	2. Menempatkan tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan selama 40 (empat puluh) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ;
	3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d..... ;
	4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Perpanjangan Penahanan.
Selesai.	
	Dikeluarkan di :
	Pada tanggal :
Penerima Perintah PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP
.....	
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Perpanjangan Penahanan ini diserahkan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarga Tersangka.	
Yang Menerima, Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga)*	Yang Menyerahkan,
.....	
)* Pilih salah satu	

g) Format Berita Acara Perpanjangan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PERPANJANGAN PENAHANAN</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya ----- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan:----- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 3. Surat Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Nomor:, tanggal; 4. Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor:, tanggal Telah melakukan perpanjangan penahanan terhadap Tersangka: ----- Nama : NIK : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupayang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang ----- Menempatkan Tersangka di Rumah Tahanan Negara di/ rumah kediaman tersangka di/ kota kediaman tersangka di selama 40 (empat puluh) hari terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal ----- Uraian singkat jalannya perpanjangan penahanan adalah sebagai berikut: --- ----- Demikian Berita Acara Perpanjangan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
--

ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka,

PPNS LH,

.....

.....
NIP

)* *Pilih salah satu*

h) Format Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENGALIHAN JENIS PENAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: setelah memperhatikan syarat-syarat yang terdapat dalam undang-undang pada tingkat penyelesaian perkara, keadaan Tersangka, tindak pidana yang dilakukan, dan situasi masyarakat setempat, atau kesehatan Tersangka, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang 3. Laporan Kejadian Nomor: tanggal 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal 6. Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. Melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka: Nama :

NIK	:	
Tempat/Tgl.lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang dari jenis penahanan di ke jenis penahanan di selama (.....) hari, terhitung mulai hari tanggal sampai dengan hari tanggal

2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;

3. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan.

Selesai.

	Dikeluarkan di	:	
	Pada tanggal	:	

Penerima Perintah PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
-------------------------------	-----------------

.....	
NIP	NIP

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.

Yang Menerima, Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga)*	Yang Menyerahkan,
--	-------------------

.....	
-------	-------

)* Pilih salah satu

i) Format Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>BERITA ACARA PENGALIHAN JENIS PENAHANAN</u>	
-----Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya: -----	

NIP., PPNS LH pada Kantor, berdasarkan, bersama-sama dengan: -----	
1. Nama :; NIP.:	
2. Nama :; NIP.:	
3. dan seterusnya.	
Masing-masing bertugas di kantor yang sama, berdasarkan:-----	
1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----	
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----	
3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal; -----	
4. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor:, tanggal	
telah melakukan pengalihan jenis penahanan terhadap Tersangka: -----	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir:	
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
dari jenis penahanan di Jalan ke jenis penahanan di Jalan -----	
Pengalihan jenis penahanan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal -----	
----- Kesehatan fisik Tersangka dalam keadaan saat dilakukan pengalihan penahanan. -----	
----- Demikian Berita Acara Pengalihan Jenis Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----	

Tersangka,	PPNS LH,
.....	
	NIP
)* Pilih salah satu	

j) Format Surat Permohonan Penitipan Tahanan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
..... 20...	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Penitipan Tahanan a.n.
Yth.:	
Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Kepolisian	
Di	
.....	
1. Dasar:	
a. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;	
b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang	
c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal	
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal	
e. Surat Perintah Penahanan Nomor:..... tanggal	
f. Surat Perintah Penitipan Tahanan Nomor:.....tanggal	
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami mohon Saudara menerima Tersangka untuk dilakukan penitipan tahanan sejak tanggal s.d atas nama:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup yang terjadi di, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang.....	
3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:	
a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal	
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: :..... tanggal	
c. Surat Perintah Penahanan Nomor: :..... tanggal	
d. Surat Perintah Penitipan Tahanan Nomor: tanggal	
4. Demikian untuk menjadi maklum.	
Atasan PPNS LH,	
.....	
NIP	
.....	

Tembusan:

1.
2.

k) Format Surat Perintah Penitipan Tahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PENITIPAN TAHANAN

Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup serta penyelesaian perkara lebih lanjut, perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang

3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

4. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP/Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP/Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk : 1. Melakukan penitipan penahanan terhadap Tersangka:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl.lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

di Rumah Tahanan Negara/Rumah Tahanan Kepolisian)*
guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara

Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang 2. Tersangka tersebut di atas dititipkan terhitung mulai tanggal 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....; 4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Penitipan Tahanan.	
Selesai.	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Penerima Perintah, PPNS LH	Atasan PPNS LH,
..... NIP.	 NIP.
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Penitipan Tahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.	
Yang Menerima, Tersangka/Advokat/Keluarga)*	Yang Menyerahkan,
.....	
<i>)* Pilih salah satu</i>	

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENITIPAN TAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan:

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor,
berdasarkan:.....

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal
4. Surat Perintah Penitipan Tahanan Nomor:, tanggal

Telah melakukan penitipan tahanan terhadap Tersangka:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

di rumah tahanan negara/rumah tahanan kepolisian)* di Jalan
Penitipan Tahanan dilakukan terhitung mulai tanggal
sampai dengan tanggal

Uraian singkat jalannya Penitipan Tahanan adalah sebagai berikut: -----

----- Demikian Berita Acara Penitipan Tahanan ini dibuat dengan sebenar-
benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan
ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana
tersebut di atas.

Tersangka,

PPNS LH,

.....

.....
NIP.

)* Pilih salah satu

m) Format Surat Permohonan Pengeluaran Tahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20...

Nomor : P-...../PPNSLH/.... /20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pengeluaran Tahanan a.n.....

Yth.:

Kepala Rumah Tahanan Negara/Kepala Kepolisian

Di

.....

1. Dasar:

a. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Undang-Undang Nomor Tahun tentang

c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal

e. Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal

f. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: tanggal

2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami mohon Saudara untuk dapat mengeluarkan Tersangka atas nama:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup yang terjadi di, yaitu sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

a. Laporan Kejadian Nomor: tanggal

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal

g. Surat Perintah Penahanan Nomor: tanggal

b. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor: tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

	 NIP
Tembusan:	
1.	
2.	

n) Format Surat Perintah Pengeluaran Tahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENGELUARAN TAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: untuk kepentingan penyidikan perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup serta penyelesaian perkara lebih lanjut, perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 4. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. Melakukan pengeluaran penahanan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/Tgl.lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan :

Alamat :	
dari Rumah Tahanan Negara/Rumah Tahanan Kepolisian)* guna kepentingan proses penyidikan dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupayang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang	
2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;	
4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pengeluaran Tahanan.	
Selesai.	
Dikeluarkan di :	
Pada tanggal :	
Penerima Perintah PPNS LH	Atasan PPNS LH,
..... NIP.	 NIP.
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Pengeluaran Tahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.	
Yang Menerima, Tersangka/Advokat/Keluarga)*	Yang Menyerahkan,
.....	
)* Pilih salah satu	

o) Format Berita Acara Pengeluaran Tahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGELUARAN TAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan:

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan:.....

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal;
4. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor:, tanggal

Telah melakukan pengeluaran tahanan terhadap tersangka:
Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
dari rumah tahanan negara/rumah tahanan kepolisian)* di Jalan
Pengeluaran Tahanan dilakukan terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal

Uraian singkat jalannya Pengeluaran Tahanan adalah sebagai berikut: -----
.....
.....

----- Demikian Berita Acara Pengeluaran Tahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas.

Tersangka,	PPNS LH,
.....	 NIP.
)* Pilih salah satu	

p) Format Surat Perintah Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENANGGUHAN PENAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: berdasarkan permintaan tersangka/keluarga/penasehat hukum mengenai penangguhan penahanan perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Undang-Undang Nomor Tahun Tentang; 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal.....; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 5. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal; 6. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal; 7. Surat Permintaan Penangguhan Penahanan oleh Tersangka/Penasehat Hukum/Keluarga tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka: Nama : NIK :

Tempat/Tgl.lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupasebagaimana dimaksud dalam pasal Undang-Undang Nomor, tahun tentang		
2. menyelenggarakan administrasi penangguhan penahanan yang berhubungan dengan jaminan dan/atau persyaratan yang telah ditentukan, serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaannya;		
3. untuk penangguhan penahanan dengan jaminan uang: Jumlah : Rp. (..... rupiah) Disimpan di : Panitera Pengadilan Negeri Jalan		
4. untuk penangguhan penahanan dengan jaminan orang, dilakukan oleh: Nama : NIK : Tempat/Tgl.Lahir: Jenis Kelamin : Kewarganegaraan: Agama : Pekerjaan : Alamat :		
5. mengawasi tersangka untuk mematuhi syarat-syarat yang ditentukan (wajib lapor dan tidak keluar rumah/kota/keluar negeri tanpa izin);		
6. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;		
7. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Penangguhan Penahanan.		
Selesai.		
Dikeluarkan di : Pada tanggal : Atasan PPNS LH,		
..... ... NIP		
Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Penangguhan Penahanan ini diserahkan kepada tersangka dan tembusannya kepada keluarga tersangka.		

Yang Menerima,
Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga)*

Yang Menyerahkan,

.....

.....

.....

)* Pilih salah satu

q) Format Berita Acara Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENANGGUHAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya
NIP., PPNS LH pada Kantor,
berdasarkan:

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
- 3. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal
- 4. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor:, tanggal
- 5. Surat Permohonan Tersangka/Keluarga Tersangka/Advokat Tersangka)*, tanggal

telah melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan jaminan orang: --- (apabila penangguhannya dijamin oleh seseorang)

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :

Pekerjaan	:	
Alamat	:	
Hubungan dengan Tersangka	:	

dengan jaminan uang: (apabila penangguhannya dijamin dengan pembayaran sejumlah uang).

Jumlah: Rp (..... rupiah)

Tempat Penyimpanan : Panitera Pengadilan Jalan

----- Demikian Berita Acara Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka,	PPNS LH,
.....	
.....	NIP.

)* Pilih salah satu

r) Format Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: berdasarkan permintaan tersangka/keluarga/advokat tersangka mengenai pencabutan penangguhan penahanan perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108, dan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor, Tahun Tentang; 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 5. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal

6. Surat Permintaan pencabutan Penangguhan Penahanan oleh Tersangka/Advokat/Keluarga tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP/Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
NIP/Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk : 1.melakukan pencabutan penangguhan penahanan terhadap Tersangka:
Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupasebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor, tahun tentang;
2. melakukan penahanan dan menempatkan kembali Tersangka pada Rumah Tahanan Negara di / rumah kediaman Tersangka di / kota kediaman Tersangka di)* guna menjalani sisa waktu masa penahanan selama ... (...) hari mulai tanggal ... s.d. ... karena Tersangka melanggar persyaratan yang telah ditetapkan.
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;
4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah,
PPNS LH

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

.....
NIP

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah diterima 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan ini diserahkan kepada Tersangka dan tembusannya kepada keluarga Tersangka.

Yang Menerima,
Tersangka/Kuasa Hukum/Keluarga)*

Yang Menyerahkan,

.....

.....

.....

)* Pilih salah satu

s) Format Berita Acara Pencabutan Penangguhan
 Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA
PENCABUTAN PENANGGUHAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan:

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
3. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan Nomor: ..., tanggal

telah melakukan pencabutan penangguhan penahanan terhadap Tersangka:

Nama :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang; --
melakukan penahanan dan menempatkan kembali tersangka di Rumah Tahanan Negara Jalan untuk menjalani masa tahanan/sisa masa tahanan)* selama

..... (.....) hari, terhitung mulai tanggal sampai dengan tanggal -----	
--	
Uraian singkat jalannya pencabutan penangguhan penahanan adalah sebagai berikut: -----	
..... (berikan uraian singkat)	
----- Demikian Berita Acara Pencabutan Penangguhan Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----	

Tersangka,	PPNS LH,
.....	
	NIP.
)* Pilih salah satu	

t) Format Surat Perintah Pembantaran Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
<u>SURAT PERINTAH PEMBANTARAN PENAHANAN</u>	
Nomor: SP.Han...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: bahwa tersangka yang ditahan menderita sakit dan dirawat di rumah sakit, perlu dilakukan pembantaran penahanan, sehingga dikeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108, dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang 3. Laporan Kejadian Nomor:....., tanggal; 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 5. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal; 6. Surat Keterangan dari Dokter tanggal tentang kondisi kesehatan Tersangka a.n.
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : NIP/Jabatan : 2. Nama :

	Pangkat/Golongan :
	NIP/Jabatan :
	3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. Melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/Tgl.lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : selama yang bersangkutan dirawat inap (opname) di Rumah Sakit Jalan mulai tanggal Sampai dengan sembuh; 2. Mengawasi dan mengamankan tersangka selama dirawat inap di rumah sakit, serta berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi Kesehatan tersangka; 3.surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....; 4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan.
Selesai.	Dikeluarkan di :..... Pada tanggal :
Yang Menerima Perintah, PPNS LH	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP
Pada hari ini, tanggal Bulan/. tahun pukul WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 satu lembar Salinan Surat Perintah Pembantaran Penahanan kepada Tersangka/keluarganya.	
Yang Menerima, Tersangka/Advokat/Keluarga)*,	Yang Menyerahkan,
.....)* Pilih salah satu	 NIP.

KOP SURAT INSTANSI

"UNTUK KEADILAN"

BERITA ACARA PEMBANTARAN PENAHANAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

telah melakukan pembantaran penahanan terhadap Tersangka:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Selanjutnya pembantaran penahanan terhadap Tersangka dari tempat penahanan pada Rumah Tahanan Negara di / rumah kediaman Tersangka di / kota kediaman Tersangka di.....)* ke tempat pembantaran penahanan pada rumah sakit di selama Tersangka dirawat inap (opname), terhitung mulai tanggal s.d. sembuh dilakukan pengawasan serta pengamanan dan berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan Tersangka. -----

----- Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: ----- (diisi proses membawa Tersangka sampai dimasukkan ke ruang perawatan dilengkapi dengan nomor kamar)

Demikian Berita Acara Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada hari, tanggal, bulan dan tahun tersebut di atas.

Tersangka,

PPNS LH,

.....	 NIP.
)* Pilih salah satu	

v) Format Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
SURAT PERINTAH PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN	
Nomor: SP.Han-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: bahwa berdasarkan surat keterangan dokter setelah melakukan pemeriksaan terhadap kesehatan tersangka menyatakan bahwa kondisi kesehatan yang bersangkutan telah membaik, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 1 angka 14 dan angka 33, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), Pasal 89 huruf c, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 108, dan Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; 4. Surat Perintah Penahanan Nomor tanggal; 5. Surat Keterangan dari Dokter tanggal Tentang kondisi Kesehatan tersangka
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/ Tgl. Lahir : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat :

Karena Tersangka dinyatakan sehat oleh dokter dari rumah sakit di sehingga tidak diperlukan lagi rawat inap.

- 2. Membawa dan mengamankan tersangka dari rumah sakit tempat tersangka dirawat inap (opname) ke Rumah Tahanan Negara di untuk melanjutkan sisa masa penahanan/perpanjangan penahanan)* serta melakukan koordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi Kesehatan tersangka;
- 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;
- 4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

.....

Yang Menerima Perintah,
PPNS LH,

Atasan PPNS LH,

.....

.....
NIP.

Pada hari ini, tanggal bulan tahun pukul WIB/WITA/WIT)* telah diserahkan 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan kepada Tersangka/Keluarga/Advokat.

Yang Menerima,
Tersangka/Keluarga/Advokat)*,

Yang Menyerahkan,

.....

.....
NIP.

)*Pilih salah satu

w) Format Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA</u> <u>PENCABUTAN PEMBANTARAN PENAHANAN</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya --- ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. telah melakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/Tgl. Lahir: Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : Terhitung mulai tanggal s/d untuk melanjutkan sisa masa penahanan di rumah tahanan..... serta berkoordinasi dengan dokter yang merawatnya untuk memantau perkembangan kondisi kesehatan tersangka. ----- Uraian singkat jalannya pencabutan pembantaran penahanan adalah sebagai berikut: (berikan uraian singkat)..... ----- Demikian Berita Acara Pencabutan Pembantaran Penahanan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----
--

Tersangka,	PPNS LH,
.....	
.....	NIP.
)* Pilih salah satu	

- o. Penggeledahan
 - 1) Format Surat Permohonan Izin Penggeledahan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....,.....	
Nomor	: P.-...../PPNSLH/...../20....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permintaan Izin Penggeledahan
Yth.	
Ketua Pengadilan Negeri;	
di	
.....	
1. Rujukan:	
a. Pasal 112, Pasal 113 dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;	
b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang	
c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal	
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal	
2. Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa untuk kepentingan penyidikan terhadap Tersangka:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Catatan: jika dilakukan oleh Badan Usaha (BU)/korporasi (K)* sbb:	
Nama BU/K	:
Tempat/Tanggal Pendirian	:
dan/atau nomor anggaran	
dasar/akta pendirian/	
peraturan/dokumen/	

perjanjian/perubahan terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :.....

Kebangsaan BU/K :

Jenis BU/K :

Bentuk BU/K :

Identitas Pengurus :

yang mewakili

diperlukan tindakan hukum berupa penggeledahan kantor/pabrik/rumah/bangunan lainnya)* yang terletak di yang diduga sebagai tempat/bersembunyinya tersangka/disembunyikan barang bukti/ sarana lain)* untuk melakukan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan penggeledahan yang dimaksud.

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal

d. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.

2.

)* Pilih salah satu.

2) Format Surat Permohonan Persetujuan Penggeledahan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

.....,.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permintaan Penetapan Penggeledahan

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri;
di

.....

1. Rujukan:
 - a. Pasal 112, Pasal 113, dan Pasal 116 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:..... tanggal.....
 - e. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: tanggal.....
 - f. Berita Acara Penggeledahan Nomor:..... tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dilaporkan kepada Ketua bahwa PPNS LH sedang menangani perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam PasalUndang-Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di....., {pada hari tanggal ... bulan tahun / dalam kurun waktu*}, PPNS LH telah melakukan tindakan hukum berupa penggeledahan tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan pertimbangan keadaan yang perlu atau mendesak karena di tempat yang hendak digeledah diduga keras terdapat Tersangka yang patut dikhawatirkan segera melarikan diri atau mengulangi Tindak Pidana atau benda yang dapat disita dikhawatirkan segera dimusnahkan atau dipindahkan, [berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap (Tersangka / Saksi*) dan atau yang diketahui langsung oleh petugas*] dengan identitas sebagai berikut:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Catatan: jika dilakukan oleh Badan Usaha (BU)/ korporasi (K) sbb:*

Nama BU/K	:	
Tempat/Tanggal Pendirian	:	
dan/atau nomor anggaran		
dasar/akta pendirian/		
peraturan/dokumen/		
perjanjian/perubahan		
terakhir		
Tempat Kedudukan BU/K	:	
Kebangsaan BU/K	:	
Jenis BU/K	:	
Bentuk BU/K	:	
Identitas Pengurus	:	
yang mewakili		
3. Berkaitan poin satu dan dua tersebut, mohon kepada Ketua untuk memberikan persetujuan atas tindakan hukum PPNS LH berupa penggeledahan orang/badan/pakaian/rumah/kantor/lokasi kegiatan/ kegiatan usaha/alat angkut/bangunan lainnya)* dengan hasil penggeledahan
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

- c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
- d. Surat Perintah Penggeledahan Nomor: tanggal.....;
- e. Berita Acara Penggeledahan Nomor:..... tanggal
- f. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

)* Pilih salah satu.

3) Format Surat Perintah Penggeledahan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PENGGELEDAHAN

Nomor: SP.Gldh-...../PPNSLH/..../20.....

Pertimbangan	: untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup diperlukan tindakan penggeledahan, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
--------------	---

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 112, Pasal 113 ayat (1), Pasal 113 ayat (4), Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :

	Pangkat/Golongan :
	Jabatan :
	3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan penggeledahan orang/badan/pakaian/rumah/ kantor/lokasi kegiatan/kegiatan usaha/alat angkut/bangunan lainnya)* di yang diduga merupakan tempat kejadian perkara/persembunyian tersangka/disembunyikannya barang bukti sehubungan dengan terjadinya Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi pada tanggal di sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang atas nama tersangka (perorangan/badan usaha/korporasi)*.
	2. penggeledahan dilaksanakan untuk kepentingan pemeriksaan dan/atau penyitaan dan/atau penangkapan tersangka.
	3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d
	4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pembantaran Penahanan membuat Berita Acara Penggeledahan paling lambat 2 (dua) hari setelah melaksanakan penggeledahan.
Selesai.	
	Dikeluarkan di :
	Pada tanggal :
Yang Menerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP.
)* Pilih salah satu.	

4) Format Berita Acara Penggeledahan

KOP SURAT INSTANSI

(Dalam hal penggeledahan disetujui oleh
tersangka/keluarga/pemilik/penghuni)

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENGGELEDAHAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)*, -----

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama
dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

telah melakukan penggeledahan terhadap
orang/badan/pakaian/rumah/kantor/ lokasi kegiatan
...../kegiatan usaha/alat angkut/bangunan lainnya)* di
..... (nama jalan, nomor, RT, RW, kelurahan) -----

Pelaksanaannya telah disetujui oleh Tersangka/keluarga/pemilik
rumah/penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)*:-----

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

dengan disaksikan oleh:-----
1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Uraian singkat jalannya penggeledahan adalah sebagai berikut: -----

----- Setelah dijelaskan dan ditunjukkan Surat Perintah Tugas
atau Surat Perintah Penggeledahan kepada tersangka/keluarga/pemilik
rumah/penghuni/penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan)* dan

kemudian dibuatkan Berita Acara Penggeledahan dengan hasil/temuan berupa: -----

- 1.; -----
- 2.; -----
- 3. dan seterusnya. (Dibuatkan daftar rincian barang/benda/dokumen/surat yang ditemukan). -----

----- Demikian Berita Acara Penggeledahan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka/Keluarga/Pemilik/
Penghuni Rumah/Penangguna
Jawab Usaha dan/atau
Kegiatan)*,

PPNS LH,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu.

5) Format Surat Permohonan Bantuan Penggeledahan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:

Perihal : Permintaan Bantuan Pengeledahan

Yth.

Kepala Kepolisian

di

.....

1. Rujukan
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, dan Pasal 117 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
2. Berdasarkan rujukan tersebut, diberitahukan bahwa dari hasil pemeriksaan terhadap perkara Tersangka:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat, Tanggal Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Agama	:	
Kewarganegaraan	:	
Pekerjaan	:	
Alamat Tinggal	:	

Diduga telah melakukan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa....yang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
3. Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa Pengeledahan terhadap:
 - a.
 - b.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk dapat menugaskan personil mendampingi PPNSLH melakukan upaya paksa pengeledahan. Sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Pengeledahan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan;
5. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
...
NIP
.....

Tembusan:
1.
2.

6) Format Surat Permohonan Bantuan Personil Penggeledahan

- p. Penyitaan
 - 1) Format Surat Permohonan Izin Penyitaan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Izin Penyitaan

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri;
Di
.....

1. Rujukan:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 118, Pasal 119, Pasal 123, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
- e. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal

2. Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Tersangka atau Saksi atau penggeledahan atau ditemukan langsung oleh Petugas PPNS LH, ditemukan benda/barang sebagai barang bukti yang diduga memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang atas nama Tersangka, yaitu:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya (*dapat dibuatkan daftar dalam lampiran*).

Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Tersangka/yang menguasai/pemilik/yang bertanggungjawab)*:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh Badan Usaha (BU)/korporasi (K)* sbb:

Nama BU/K :
Tempat/Tanggal Pendirian :
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir
Tempat Kedudukan BU/K :
Kebangsaan BU/K :
Jenis BU/K :
Bentuk BU/K :
Identitas Pengurus :
yang mewakili

3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat izin dimaksud.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Penyitaan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan;
5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

- 1.
- 2.

)* Pilih salah satu.

2) Format Surat Permohonan Persetujuan Penyitaan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
..... 20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Persetujuan Penyitaan
Kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri; Di	
1. Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 119, Pasal 123, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal e. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal	
2. Berdasarkan rujukan di atas, dengan ini diberitahukan bahwa hasil pemeriksaan terhadap Tersangka atau Saksi atau pengeledahan atau ditemukan langsung oleh Petugas PPNS LH, ditemukan benda/barang sebagai barang bukti yang diduga memiliki hubungan langsung dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka, yaitu: a.; b.; c. dan seterusnya (<i>dapat dibuatkan daftar dalam lampiran</i>).	
Untuk kepentingan penyidikan diperlukan tindakan hukum berupa penyitaan terhadap barang bukti tersebut dari Tersangka/yang menguasai/pemilik/yang bertanggungjawab)*:	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:

Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh Badan Usaha (BU)/ korporasi (K)* sbb:

Nama BU/K :

Tempat/Tanggal Pendirian :
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :.....

Kebangsaan BU/K :

Jenis BU/K :

Bentuk BU/K :

Identitas Pengurus :
yang mewakili

3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat persetujuan dimaksud.

4. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.

2.

)* Pilih salah satu.

3) Format Surat Perintah Penyitaan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PENYITAAN

Nomor: SP.Sita-...../PPNSLH/...../20.....

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup diperlukan tindakan penyitaan terhadap benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar : 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120, Pasal 123, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, dan Pasal 137 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal]....

DIPERINTAHKAN

Kepada : 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk : 1. melakukan penyitaan benda/barang berupa:
a.;
b.;
c. dan seterusnya (*dapat dibuatkan daftar dalam lampiran*).
Yang merupakan barang bukti diduga ada kaitannya dengan tindak pidana lingkungan hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
2. melakukan pembungkusan dan/atau penyegehan dan pemasangan label terhadap benda/barang yang disita;
3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d;
4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Penyitaan.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....

Yang Menerima Perintah,
PPNS LH,

Atasan PPNS LH,

.....
NIP
.....

.....
NIP.
.....

4) Format Berita Acara Penyitaan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PENYITAAN</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya ----- -----	
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----	
1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya.	
telah melakukan penyitaan benda/barang berupa: -----	
1.; ----- 2.; ----- 3. dan seterusnya. <i>(Dibuatkan lampiran daftar rincian benda/barang yang disita).</i>	
dari Tersangka/pemilik/yang menguasai/yang bertanggung jawab)*:-----	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl. Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
dengan disaksikan oleh:-----	
1. Nama	:
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:
2. Nama	:
Pekerjaan/Jabatan	:
Alamat	:
dalam rangka penanganan perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang -----	
Uraian singkat jalannya penyitaan adalah sebagai berikut: ----- ----- Benda/barang sebagai barang bukti diserahkan/diambil)* dari pemilik/yang menguasai/yang bertanggung jawab/ditemukan pada diri	

saksi/Tersangka pada saat tertangkap tangan)* setelah dilakukan penggeledahan.----- Demikian Berita Acara Penyitaan ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka/Pemilik/
Yang Menguasai Barang/
Yang Bertanggung jawab,

PPNS LH,

.....

.....
NIP.....

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu.

5) Format Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>SURAT PERINTAH PENGEMBALIAN BARANG BUKTI</u>	
Nomor: SP-BB...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan, terhadap barang bukti yang telah dilakukan penyitaan dan telah mendapat kan persetujuan/izin dari Ketua Pengadilan Negeri serta tidak termasuk ke dalam barang bukti yang harus dirampas/dimusnahkan sehingga harus dikembalikan kepada yang berhak karena penyidikan dihentikan, maka perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 133 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal

	4. Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ... Nomor tanggal;
	5. Surat Perintah Penyitaan Nomor:, tanggal
	DIPERINTAHKAN
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. melakukan pengembalian barang bukti yang telah dilakukan penyitaan oleh PPNS LH pada tanggalberupa: a..... b..... c..... 2. menyerahkan kepada mereka dari mana barnag bukti itu disita atau kepada yang paling berhak, atas nama.....,nomor identitas....., kewarganegaraan....., jenis kelamin, tempat/ tanggal lahir.....,pekerjaan.....,agama.....,alamat. Karena penyidikannya dihentikan. 3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d; 4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pengembalian Barang Bukti.
Selesai	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Yang Menerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP.
.....	

6) Format Berita Acara Pengembalian Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” <u>BERITA ACARA PENGEMBALIAN BARANG BUKTI</u> ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)* saya ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. telah mengembalikan barang bukti yang telah disita berdasarkan Surat Perintah Pengembalian Barang Bukti Nomor: tanggal berupa: ----- 1.; 2.; 3. dan seterusnya. <i>(sesuai dengan barang bukti yang terdaftar dalam lampiran)</i>,----- kepada: ----- Nama : NIK : Tempat/Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : dengan disaksikan oleh: ----- 1. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : Uraian singkat jalannya pengembalian barang bukti adalah sebagai berikut(berikan uraian secara singkat). ----- ----- Demikian Berita Acara Pengembalian Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----
--

Yang menerima
Tersangka/Pemilik/Yang Menguasai/
Yang Bertanggung jawab)*

Yang mengembalikan,
PPNS LH,

.....

.....

NIP.

.....

Saksi-Saksi

1.
.....

2.

)* *Pilih salah satu*

7) Format Surat Permohonan Izin Pemusnahan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
..... 20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/...../.20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Izin Pemusnahan Barang Bukti
Yth. Ketua Pengadilan Negeri Di	
1. Rujukan: a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf o, Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal	
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa barang bukti berupa: a. jenis barang : b. karakteristik/kode limbah: c. volume/berat : merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)* yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan dapat mencemari/merusak lingkungan hidup, maka perlu dilakukan pemusnahan.	
3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat izin dimaksud.	
4. Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan: a. Laporan Kejadian; b. Surat Perintah Penyidikan; c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan; c. Surat Perintah Penyitaan; d. Laporan Kemajuan Penyidikan.	
5. Demikian untuk menjadi maklum	

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

)* Pilih salah satu.

8) Format Surat Perintah Pemusnahan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

Nomor: SP-BB...../PPNSLH/...../20.....

Pertimbangan

: bahwa untuk kepentingan perlu dilakukan pemusnahan barang bukti yang diduga memiliki hubungan langsung maupun tidak langsung dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup sehingga perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar

: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf o, Pasal 119 ayat (1), Pasal 120 ayat (1), dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
3. Surat Perintah Penyidikan Nomor, tanggal;
4. Surat Ketetapan Penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri ... Nomor, tanggal;
5. Surat Izin Pemusnahan dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor, tanggal

DIPERINTAHKAN

Kepada

: 1. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
2. Nama :
Pangkat/Golongan :
Jabatan :
3. Dan seterusnya

Untuk

: 1. melakukan pemusnahan barang bukti sebagaimana tersebut dalam lampiran surat perintah ini;

2. menyisahkan sebagian kecil barang bukti dari setiap jenis/sifat/ukuran/bentuk untuk kepentingan pembuktian;

3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d;

4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :
.....

Yang Menerima Perintah,
PPNS LH,

.....
.....
NIP
.....

Atasan PPNS LH,

NIP.

)* Pilih salah satu

9) Format Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----.....-----

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----
1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

telah memusnahkan barang bukti dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....:

1.; -----

2. dan seterusnya. -----

Pemusnahan barang bukti tersebut disaksikan oleh: -----

1. Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

Uraian singkat jalannya pemusnahan barang bukti adalah sebagai berikut: --

.....(berikan uraian secara singkat). -----

----- Demikian Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Tersangka/Pemilik/Yang Menguasai/
Yang Bertanggung jawab)*

Yang Menerima,
PPNS LH,

.....

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

10) Format Surat Permohonan Izin Reekspor Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Reekspor Barang Bukti

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Di

.....

1. Rujukan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Pasal 21 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi (*apabila subjek hukum Badan Usaha/Korporasi*);
 - d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 1993 tentang Pengesahan *Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and Their Disposal*;
 - e. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - f. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa barang bukti berupa:
 - a. jenis barang :
 - b. karakteristik/kode limbah:
 - c. volume/berat :merupakan Bahan Berbahaya dan Beracun/Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun)* yang tidak dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama dan dikhawatirkan dapat membahayakan/mencemari/merusak lingkungan hidup, maka perlu dilakukan reekspor.
3. Sehubungan dengan keperluan tersebut, diminta agar Ketua dapat menerbitkan surat izin dimaksud.
4. Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Penyitaan;
 - d. Laporan Kemajuan Penyidikan.
5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

)* *Pilih salah satu.*

11) Format Surat Perintah Reekspor Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>SURAT PERINTAH REEKSPOR BARANG BUKTI</u>	
Nomor: SP.BB-...../PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan dan barang bukti merupakan benda/barang yang membahayakan dan/atau bersifat terlarang atau terlarang diedarkan yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan harus segera dikembalikan ke negara asalnya, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 132 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor, tanggal; 4. Surat Ketetapan Reekspor dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	:1. melakukan reekspor barang bukti ke negaraberupa: a..... b..... c..... 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d; 3. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Reekspor Barang Bukti.
Selesai.	
Dikeluarkan di :	

	Pada tanggal _____ : _____
Penerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
_____ NIP	_____ NIP.

12) Format Berita Acara Reekspor Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>BERITA ACARA REEKSPOR</u> <u>BARANG BUKTI</u>	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya ----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ----- 1. Nama :; NIP.: 2. Nama :; NIP.: 3. dan seterusnya. telah melakukan reekspor barang berupa limbah/limbah bahan berbahaya dan beracun/bahan berbahaya dan beracun)* berupa sejumlah ke negara dengan menggunakan alat angkut ----- Reekspor tersebut disaksikan oleh:----- 1. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : Uraian singkat jalannya reekspor limbah/limbah bahan berbahaya dan beracun/bahan berbahaya dan beracun)* adalah sebagai berikut: -----(berikan uraian secara singkat). ----- ----- Demikian Berita Acara Reekspor Barang Bukti ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan	

ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Yang Menguasai

PPNS LH,

.....

.....

Saksi-Saksi

NIP.

1.

2.

)* Pilih salah satu

13) Format Berita Acara Penyisihan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENYISIHAN

BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ---

1. Nama :; NIP.:

2. Nama :; NIP.:

3. dan seterusnya.

telah melakukan penyisihan barang bukti di berupa: -----

1.

2.

3. (dst)

atau dapat dibuat daftar barang bukti yang disisihkan sebagai berikut: -----

No.	Kode Sampel	Lokasi/ Koordinat	Jenis Barang Bukti	Jumlah/ Berat/ Volume/ Lembar	Metode Pengambilan	Ket.
1.						
2.						
3.						
dst						

dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	
2. Nama	:	
Pekerjaan/Jabatan	:	
Alamat	:	

--- Penyisihan tersebut dilakukan untuk kepentingan penanganan kasus Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup. -----

----- Demikian Berita Acara Penyisihan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Pemilik/Yang Menguasai)*

PPNS LH,

.....

.....

NIP

Saksi-Saksi

1.

2.

)* Pilih salah satu

14) Format Surat Permohonan Penitipan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor

: P-...../PPNSLH/...../20....

Sifat

: Penting

Lampiran

:

Perihal

: Permohonan Penitipan Barang Bukti

Yth.

Kepala Rumah Penitipan Barang Sitaan

Di

.....

1. Rujukan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 130, Pasal 131, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - e. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal
2. Berdasarkan rujukan diatas dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa PPNS LH (*nama instansi*) sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa ... yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka
3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kepentingan penyidikan PPNS LH perlu melakukan penitipan barang bukti yang telah disita di Rumah Penitipan Barang Sitaan ... Adapun barang bukti yang dititipkan sebagai berikut:
 - a.;
 - b.;
 - c. dan seterusnya.(*atau dapat dibuatkan daftar dalam lampiran*)
4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - c. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal
 - d. Surat Perintah Penitipan Barang Bukti Nomor:; tanggal
5. Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.....

15) Format Surat Perintah Penitipan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
SURAT PERINTAH PENITIPAN BARANG BUKTI Nomor: SP.BB-...../PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup diperlukan tindakan penitipan terhadap benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 130, Pasal 131, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal ... Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal 5. Surat Perintah Penyitaan Nomor:....., tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Dan seterusnya.
Untuk	: 1. melakukan penitipan benda/barang bukti hasil sitaan berupa: a.; b.; c. dan seterusnya (<i>dapat dibuatkan daftar dalam lampiran</i>). Yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka di Rumah Penitipan Barang Bukti..... yang beralamat di 2. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d 3. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Penitipan Barang Bukti.

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :.....

Penerima Perintah,
PPNS LH,

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

.....
NIP.

16) Format Berita Acara Penitipan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PENITIPAN
BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul
(WIB/WITA/WIT)*, saya ----.....-----
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ---

1. Nama :; NIP.:
2. Nama :; NIP.:
3. dan seterusnya.

telah melakukan penitipan barang bukti hasil sitaan di Rumah Penitipan
Barang Bukti yang beralamat di berupa: -----

1.
2.
3. (dst),
(atau dapat dibuat tabel daftar barang bukti yang dititipkan
dengan disaksikan oleh:-----

1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

dalam perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun
..... tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama
Tersangka ---

----- Demikian Berita Acara Penitipan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Yang Menerima Penitipan,

PPNS LH,

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1. 2.

)* *Pilih salah satu*

17) Format Surat Permohonan Titip Rawat Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Titip Rawat

Yth.
.....

Di
.....

1. Rujukan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 130, Pasal 131, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - e. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal
 - f. Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor:; tanggal
2. Berdasarkan rujukan diatas dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa PPNS LH (*nama instansi*) sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa ... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka

3. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, untuk kepentingan penyidikan PPNS LH perlu melakukan titip rawat barang bukti yang memerlukan perawatan khusus kepada Bapak/Ibu. Adapun barang bukti yang dititipkan sebagai berikut:

- a.;
- b.;
- c. dan seterusnya.

(atau dapat dibuatkan daftar dalam lampiran)

Dengan ketentuan apabila untuk kepentingan penyidikan sewaktu-waktu membutuhkan barang bukti tersebut Bapak/Ibu sanggup segera menyerahkan kepada penyidik dalam keadaan baik/lengkap/sehat.

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:
- a. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - c. Surat Perintah Penyitaan Nomor:; tanggal
 - d. Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti Nomor:; tanggal...
.....

5. Demikian disampaikan, atas kerjasama Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.....

18) Format Surat Perintah Titip Rawat Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT PERINTAH TITIP RAWAT BARANG BUKTI

Nomor: SP.BB-...../PPNSLH/..../20.....

Pertimbangan : untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup diperlukan tindakan titip rawat terhadap benda/barang yang diduga memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana yang terjadi yang memerlukan perawatan khusus, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.

Dasar: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 130, Pasal 131, Pasal 241 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Pasal Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang ...;	
Laporan Kejadian Nomor:, tanggal	
Surat Perintah Penyidikan Nomor: ..., tanggal	
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan :
2. Nama	: Pangkat/Golongan : Jabatan :
3. Dan seterusnya.	
Untuk : 1. melakukan titip rawat barang bukti hasil sitaaan yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka ... berupa:;; dan seterusnya	
(atau dapat dibuatkan daftar dalam lampiran).	
kepada ... untuk dipelihara/dirawat sehingga apabila sewaktu-waktu pemeriksaan memerlukan barang bukti dapat dihadirkan dalam kondisi baik/lengkap.	
surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d	
setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti.	
Selesai.	
Dikeluarkan di	:
Pada tanggal	:
Penerima Perintah, PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP.	 NIP.

19) Format Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA TITIP RAWAT
BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----
NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ---

1. Nama :; NIP.:

2. Nama :; NIP.:

3. dan seterusnya.

telah melakukan titip rawat barang bukti hasil sitaan yang diduga ada kaitannya dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa atas nama Tersangka sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang, kepada: -----

Nama :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pekerjaan :

Alamat :

Adapun barang bukti yang dititipkan untuk dirawat berupa: -----

1.

2.

3. (dst),

(atau dapat dibuat tabel daftar barang bukti yang dititipkan)

dengan ketentuan apabila untuk kepentingan penyidikan sewaktu-waktu memerlukan barang bukti tersebut, sanggup segera menyerahkan kepada penyidik dalam keadaan baik/lengkap/sehat. -----

Penitipan barang bukti untuk dirawat disaksikan oleh:-----

1. Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

2. Nama :

Pekerjaan/Jabatan :

Alamat :

----- Demikian Berita Acara Titip Rawat Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Yang Menerima Titip Rawat, PPNS LH,

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi-Saksi

1. 2.

) Pilih salah satu*

- q. Pemeriksaan Surat
1) Format Surat Perintah Pemeriksaan Surat

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>SURAT PERINTAH PEMERIKSAAN SURAT</u> Nomor: SP.Srt...../PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, penyidik berwenang untuk membuka, memeriksa dan/atau menyita surat yang dikirim melalui kantor pos dan giro, jasa pengiriman barang atau angkutan karena diduga kuat mempunyai hubungan dengan perkara pidana yang ditangani, maka perlu dikeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Pasal 137, Pasal 138, Pasal 139 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal 4. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : - Pangkat/Golongan : - Jabatan : 2. Nama : - Pangkat/Golongan : - Jabatan : 3. dan seterusnya.
Untuk	: 1. melakukan pemeriksaan terhadap surat yang berada di (kantor pos, perusahaan telekomunikasi, dan/atau

perusahaan pengangkutan) sehubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di, pada hari tanggal bulan tahun / dalam kurun waktu, dengan Terlapor/Tersangka)* atas nama

- 2. meminta kepada pihak yang menguasai surat tersebut untuk memberikan kepada penyidik untuk dilakukan pembukaan dan pemeriksaan dan tanda terima kepada pihak yang menguasai surat tersebut;
- 3. mengembalikan surat tersebut kepada yang menguasai apabila setelah dilakukan pembukaan dan pemeriksaan ternyata surat tersebut tidak ada kaitan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup dan membubuhkan cap yang berbunyi “TELAH DIBUKA OLEH PENYIDIK” dilengkapi tanggal, tanda tangan, identitas penyidik serta wajib merahasiakan isi surat tersebut;
- 4. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d
- 5. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH serta membuat Berita Acara Pemeriksaan Surat.

Selesai.

Dikeluarkan di:
pada tanggal :
.....

Penerima Perintah,
PPNS LH,

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

.....
NIP.

)* Pilih salah satu

2) Format Berita Acara Pemeriksaan Surat

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” BERITA ACARA PEMERIKSAAN SURAT ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----..... NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: --- 1. Nama :; NIP : ----- 2. Nama :; NIP : ----- 3. dan seterusnya. ----- Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; ----- 3. Surat Perintah Pemeriksaan Surat Nomor:, tanggal ----- Telah melakukan pemeriksaan surat yang berada di (kantor pos, perusahaan telekomunikasi, dan/atau perusahaan pengangkutan)*, dari pihak yang menguasai surat dengan identitas sebagai berikut: ----- Nama : NIK : Kewarganegaraan : Jenis kelamin : Tempat/Tanggal Lahir : Pekerjaan : Agama : Alamat : Benda – benda tersebut sebagai barang bukti, sehubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di, pada hari tanggal bulan tahun / dalam kurun waktu dengan Terlapor/Tersangka)* atas nama, berupa: ----- 1.; ----- 2.; ----- 3. ----- Dengan disaksikan oleh: ----- 1. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: -----
--

----- Demikian Berita Acara Pemeriksaan Surat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Penyidik

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi – Saksi :

1. (nama)
.....

2. (nama)
.....

)* *Pilih salah satu*

3) Format Tanda Terima Pemeriksaan Surat

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

TANDA TERIMA PEMERIKSAAN SURAT

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun
(.....), pukul WIB/WITA/WIT)*, saya: -----

----- (NAMA PENYIDIK) -----
NIP., Pangkat/Golongan, PPNS LH pada kantor, bersama
– sama dengan: -----
-

- 1. Nama :; NIP : -----
-
- 2. Nama :; NIP : -----
-
- 3. dan seterusnya. -----
-

Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: -----
-

- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
-
- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
-

3. Surat Perintah Pemeriksaan Surat Nomor:, tanggal; -----

4. Berita Acara Pemeriksaan Surat tanggal -----

Telah melakukan pemeriksaan surat yang berada di (kantor pos dan giro, jasa pengiriman barang atau angkutan)*, dari pihak yang menguasai surat dengan identitas sebagai berikut: -----

-

Nama:, nomor identitas:, kewarganegaraan:, jenis kelamin: (laki-laki/perempuan), tempat/tanggal lahir:, pekerjaan:, agama:, alamat:

Benda – benda tersebut sebagai barang bukti, sehubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di, pada hari tanggal bulan tahun / dalam kurun waktu dengan Terlapor/Tersangka)* atas nama, berupa: -----

1.; -----

-

2.; -----

-

3. -----

-

Dengan disaksikan oleh: -----

1. Nama:, nomor identitas:, kewarganegaraan:, jenis kelamin: (laki-laki/perempuan), tempat/tanggal lahir:, pekerjaan:, agama:, alamat:;

2. Nama:, nomor identitas:, kewarganegaraan:, jenis kelamin: (laki-laki/perempuan), tempat/tanggal lahir:, pekerjaan:, agama:, alamat:

Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: -----

.....

.....

..... -----

----- Demikian Tanda Terima Pemeriksaan Surat ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Penyidik

(nama)

(nama)

.....

NIP.

Saksi – Saksi :

1. (nama)

2. (nama)

.....

.....

)* Pilih salah satu

- r. Pemblokiran
 - 1) Format Surat Permohonan Izin Pemblokiran

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Izin Pemblokiran Terhadap Rekening/Dokumen)*

Yth.

Ketua Pengadilan Negeri

Di

.....

1. Rujukan:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal

2. Berdasarkan rujukan diatas dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa PPNS LH (*nama instansi*) sedang melakukan penyidikan perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa ... yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. Guna kepentingan proses penyidikan dimaksud, dimohon kepada Ketua untuk dapat memberikan izin kepada Penyidik untuk dapat memblokir dan mendapatkan keterangan dari rekening/dokumen)* yang diduga menerima aliran dana hasil Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup dengan Nomor Rekening/dokumen)* Bank a.n

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.
.....

Tembusan:
1.
2.

)* Pilih salah satu

2) Format Surat Permohonan Persetujuan Pemblokiran

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Pemblokiran Terhadap Rekening/Dokumen)*

Yth.
Ketua Pengadilan Negeri
Di
.....

1. Rujukan:
a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 140 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
2. Sehubungan dengan rujukan di atas, dilaporkan kepada Ketua bahwa PPNS LH sedang menangani perkara Tindak Pidana bidan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam PasalUndang-Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di....., pada hari tanggal ... bulan tahun / dalam kurun waktu)*, PPNS LH telah melakukan tindakan hukum berupa pemblokiran tanpa izin dari Ketua Pengadilan Negeri dengan pertimbangan keadaan yang perlu atau mendesak karean potensi dialihkannya harta kekayaan/adanya tindak pidana terkait informasi dan transaksi elektronik/telah terjadi pemufakatan dalam tindak pidana terorganisasi/situasi berdasarkan penilaian PPNSLH)*

berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Tersangka/Saksi)* dan/atau yang diketahui langsung oleh petugas)* dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

3. Berkaitan poin satu dan dua tersebut, mohon kepada Ketua untuk memberikan persetujuan atas tindakan hukum PPNS LH berupa pemblokiran dengan Rekening/dokumen)* sebagai berikut :

a.....
b.....
c.....

4. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini dilampirkan:

a. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
b. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
c. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal;
d. Surat Perintah Pemblokiran Nomor: tanggal.....;
e. Berita Acara Pemblokiran Nomor:..... tanggal;
f. Laporan Kemajuan Penyidikan.

5. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

Tembusan:

1.
2.

)* Pilih salah satu

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pemblokiran Rekening

Yth.
Kepala Lembaga Keuangan.....
Di

.....

1. Rujukan:
 - a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 140 KUHAP;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - e. Surat Penetapan Izin Pemblokiran dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor:; tanggal.....
2. Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bahwa Penyidik PPNS LH sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... UU Nomor Tahun tentang, yang diduga dilakukan oleh Tersangka dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
3. Berkaitan dengan poin satu dan dua tersebut, diajukan permohonan untuk melakukan pemblokiran rekening yang diduga menerima aliran dana hasil/ (hal lain) berhubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, dengan nomor rekening sebagai berikut:
 - a. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*).....;
 - b. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*)...; apabila lebih dari 1 (satu) rekening;
 - c. dokumen
4. Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
 - a. Laporan Kejadian;
 - b. Surat Perintah Penyidikan;
 - c. Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;

- d. Surat Penetapan Izin Pemblokiran dari Ketua Pengadilan Negeri Nomor:, tanggal.....
5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
 2.
-)* *Pilih salah satu.*

4) Format Berita Acara Pemblokiran

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PEMBLOKIRAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)*, saya -----.....-----

NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: ---

1. Nama :; NIP : -----
2. Nama :; NIP : -----
3. dan seterusnya. -----

Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: -----

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; -----
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; -----
3. Surat Perintah Pemblokiran Nomor:, tanggal; -----

Telah melakukan pemblokiran terhadap, yang diduga menerima aliran dana hasil/berhubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, dimiliki oleh identitas sebagai berikut: -----

Nama	:	
NIK	:	
Kewarganegaraan	:	
Jenis kelamin	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
Pekerjaan	:	
Agama	:	
Alamat	:	

Pemblokiran tersebut dilakukan, sehubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di, pada hari tanggal bulan tahun / dalam kurun waktu

dengan Pelapor/Terlapor/Tersangka atas nama, berupa: -----

- 1. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*).....;
- 2. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*)...; apabila lebih dari 1 (satu) rekening;
- 3. dokumen

Dengan disaksikan oleh: -----

- 1. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :
- 2. Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Alamat :

Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: -----

.....
.....
.....

----- Demikian Berita Acara Pemblokiran ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Penyidik

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi – Saksi :

1. (nama)
.....

2. (nama)
.....

)* Pilih salah satu

5) Format Surat Permohonan Pencabutan Pemblokiran Kepada Instansi Terkait

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/.... /20.....

Sifat : Penting

Lampiran :

Perihal : Permohonan Pencabutan Pemblokiran Rekening

Yth.

Kepala Lembaga Keuangan

Di

.....

1. Rujukan:

a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 140, KUHP;

b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

c. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal

e. Surat Permohonan Pemblokiran Rekening Nomor:; tanggal

f. Putusan Pengadilan Negeri Nomor:; tanggal; (*apabila digugat pra-peradilan*)

g. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:; tanggal

2. Berdasarkan rujukan diatas dengan ini diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa PPNS LH [Pusat/Instansi/Balai] telah melakukan pemblokiran rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang yang terjadi di pada tanggal atas nama Tersangka dengan identitas sebagai berikut:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

3. Berkaitan dengan poin satu dan dua tersebut, mohon kepada Bapak/Ibu untuk membuka blokir rekening sebagai berikut:

a. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*)...;

b. [nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*)...;*

karena sudah tidak diperlukan lagi untuk proses penyidikan

4. Demikian untuk menjadi maklum

	Atasan PPNS LH,
	
	..
	NIP.
	
Tembusan Yth.:	
1.	
2.	

6) Format Berita Acara Pencabutan Pemblokiran

KOP SURAT INSTANSI “UNTUK KEADILAN” BERITA ACARA PENCABUTAN PEMBLOKIRAN ----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul (WIB/WITA/WIT)* saya -----.....----- NIP., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: --- 1. Nama :; NIP : ----- 2. Nama :; NIP : ----- 3. dan seterusnya. ----- Masing-masing bertugas di kantor, berdasarkan: ----- 1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal; ----- 2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal; ----- 3. Surat Perintah Pemblokiran Nomor:, tanggal; ----- Telah melakukan pencabutan pemblokiran terhadap, yang diduga menerima aliran dana hasil/berhubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup, dimiliki oleh identitas sebagai berikut: ----- Nama : NIK : Kewarganegaraan : Jenis kelamin : Tempat/Tanggal Lahir : Pekerjaan : Agama : Alamat : Pencabutan Pemblokiran tersebut dilakukan, sehubungan dengan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang – Undang Nomor Tahun tentang, yang terjadi di, pada hari tanggal bulan tahun / dalam kurun waktu dengan Terlapor/Tersangka)* atas nama, berupa: ----- 1. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*).....; 2. nomor rekening atas nama ...(milik: perorangan / badan hukum*)...; apabila lebih dari 1 (satu) rekening; ----- 3. dokumen Dengan disaksikan oleh: ----- 1. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat : 2. Nama : Pekerjaan/Jabatan : Alamat :
--

Adapun pelaksanaannya sebagai berikut: -----
.....
.....
.....

----- Demikian Berita Acara Pencabutan Pemblokiran ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani di, pada hari, tanggal, bulan, dan tahun tersebut di atas. -----

Yang Menerima

Penyidik

.....
NIP.

.....
NIP.

Saksi – Saksi :

1. (nama)
.....

2. (nama)
.....

)* *Pilih salah satu*

- s. Larangan Bagi Tersangka Untuk Keluar Wilayah Indonesia
Format Surat Permohonan Pencegahan Ke Luar Negeri

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Pencegahan Tersangka keluar wilayah Indonesia

Yth.
Kepala Kepolisian
Di

-
- Rujukan:
 - Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), dan Pasal 141 KUHP;
 - Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - Laporan Kejadian Nomor:; tanggal
 - Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal
 - Berdasarkan rujukan tersebut diatas, bahwa Penyidik PPNS LH sedang melakukan penyidikan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal..... UU Nomor Tahun tentang, yang diduga dilakukan oleh Tersangka dengan identitas sebagai berikut:

Nama :
Nomor Paspor :
Tempat/Tgl. Lahir:
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
 - Berkaitan dengan poin tersebut di atas, bersama ini dengan hormat kami mohon bantuan Saudara untuk dapat mencegah Tersangka keluar wilayah Indonesia karena proses penyidikan belum selesai dan dikhawatirkan akan melarikan diri ke luar negeri.
 - Untuk keperluan tersebut pada butir di atas, sebagai bahan pertimbangan dilampirkan:
 - Laporan Kejadian;
 - Surat Perintah Penyidikan;
 - Surat Perintah Dimulainya Penyidikan;
 - Surat Penetapan Tersangka;
 - Salinan Paspor.

5. Demikian untuk menjadi maklum

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

- 1.
- 2.

1) Format Surat Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Orang

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

....., 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Orang (DPO)

Yth.,
Kepala Kepolisian
di
.....

1. Rujukan:
a. Undang – Undang Nomor Tahun tentang;
b. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal:;
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal:;
d. Surat Panggilan Tersangka ke-1 Nomor :, tanggal:;
e. Surat Panggilan Tersangka ke-2 Nomor:, tanggal:
2. Bersama ini diminta bantuan Kepala untuk dapat menerbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO) sehubungan dengan perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa yang terjadi di....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang–Undang Nomor Tahun tentang terhadap tersangka:
Nama lengkap :
Nama samaran dan sebagainya :
Tempat/Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Alamat tempat tinggal :
Pekerjaan terakhir/dahulu :
No. Telp/Fax/Email :
Sudah pernah tersangkut urusan
Polisi/pernah dihukum, dsb :
Lain-lain keterangan yang penting
(No. Paspor No. KTP/SIM) :
Rumus Dactiloscropy :
Ciri-ciri khusus
Tinggi badan :
Bentuk muka :
Bentuk mata :
Warna kulit :
Jenis Rambut :

Melanggar	:	
No. Reg Kejahatan/Pelanggaran		
dari PPNS LH	:	

3. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

Tembusan Yth. :

1.

2.

1) Format Surat Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Barang

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
.....,20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/..../20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Permohonan Penerbitan Daftar Pencarian Barang
	
Yth.,	
Kepala Kepolisian	
di	
	
1. Rujukan:	
a. Undang – Undang Nomor	Tahun tentang
b. Laporan Kejadian Nomor:	tanggal:
c. Surat Perintah Penyidikan Nomor:	tanggal:
2. Bersama ini diminta bantuan Kepala untuk dapat menerbitkan daftar pencarian barang sehubungan dengan perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa	yang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang–Undang Nomor Tahun tentang
3. Bahwa barang yang dicari tersebut memiliki keterangan sebagai berikut:	
1. Nama Barang	:
2. Jumlah	:
3. Tanda – tanda khusus	: a. Nomor registrasi :
	b. Isi silinder :
	c. Bahan bakar :
	d. Warna TNKB :
	e. Tahun registrasi :
	f. Nomor BPKB :
	g. :
4. Ciri – ciri	: a. Tipe :
	b. Jenis :
	c. Model :
	d. :
5. Warna	:
6. Tahun pembuatan	:
7. Taksiran harga	:
8. Merek dagang	:
9. Nomor pembuatan	:
10. Tempat pembuatan	:

11. Cara hilangnya	:	;
12. Keterangan lain yang penting	:	
4. Demikian disampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.		
Atasan PPNS LH,		
..... NIP.		
Tembusan Yth. :		
1.		
2.		

2. Administrasi Penyidikan yang Bukan Merupakan Isi Berkas Perkara
- a. Format Surat Perintah Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
SURAT PERINTAH PENYELIDIKAN	
Nomor: SP.Lidik-...../PPNSLH/...../20....	
Pertimbangan	: bahwa untuk kepentingan pelaksanaan penyidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup, maka perlu mengeluarkan surat perintah.
Dasar	: 1. Pasal 5 Ayat (1) dan Pasal 13 Ayat (2), dan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun Tentang ; 3. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama :..... Pangkat/Golongan :..... NIP/Jabatan :..... 2. Nama :..... Pangkat/Golongan :..... NIP/Jabatan :.....

3. Dan seterusnya	
Untuk	: 1.melakukan penyelidikan terhadap dugaan tindak pidana di bidang lingkungan hidup yaitu yang diduga dilakukan oleh (<i>orang dan/atau badan usaha</i>) yang terjadi di, sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor ... Tahun tentang
	2. membuat rencana penyelidikan;
	3. surat perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d.....;
	4. setelah melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh tanggung jawab agar segera melaporkan kepada Atasan PPNS LH.
Selesai.	
	Dikeluarkan di : Pada tanggal :
Penerima Perintah PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
..... NIP	 NIP

b. Format Rencana Penyelidikan

KOP SURAT INSTANSI		
RENCANA PENYELIDIKAN		
DUGAAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Tanggal Penyusunan:		Penyusun
dd/mm/yyyy		Nama tim penyusun
1.	Dasar Perkara	- Surat Perintah Pengumpulan Bahan dan Keterangan Nomor :; Tanggal; Bulan; Tahun;
2.	Objek Penyelidikan	1. Tempus/Waktu Kejadian 2. Lokus/Tempat Kejadian 3. Pasal Sangkaan
3.	Personil	1. ... 2. ... 3. ...
4.	Alat dan Bahan	1. ... 2. ... 3. ...
5.	Mekanisme Pengumpulan Bahan dan Keterangan	...
6.	Daftar Barang / Benda/Dokumen yang diduga terkait dengan dugaan Tindak Pidana	...
7.	Tata Waktu Pengumpulan Bahan dan Keterangan	...
8.	Anatomi Kasus	...
9.	Kebutuhan Anggaran Pengumpulan Bahan dan Keterangan	...
PPNS LH,		Atasan PPNS LH,
..... NIP		 NIP

c. Format Rencana Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI		
"UNTUK KEADILAN"		
RENCANA PENYIDIKAN		
DUGAAN TINDAK PIDANA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP		
Tanggal Penyusunan:		Penyusun
dd/mm/yyyy		Nama tim penyusun
1.	Dasar Perkara	- Laporan Kejadian Nomor :; Tanggal; Bulan....; Tahun; - Surat Perintah Penyidikan Nomor :; Tanggal; Bulan; Tahun;
2.	Objek Penyidikan	1. Tempus/Waktu Kejadian 2. Lokus/Tempat Kejadian 3. Pasal Sangkaan
3.	Personil Penyidikan	1. ... 2. ... 3. ...
4.	Alat dan Bahan	1. ... 2. ... 3. ...
5.	Mekanisme Penyidikan	...
6.	Daftar Barang / Benda/Dokumen yang diduga terkait dengan dugaan Tindak Pidana	...
7.	Tata Waktu Penyidikan	1. Jadwal Pemanggilan Saksi 2. Jadwal Pemanggilan Ahli 3. Penyitaan 4. Penggeledahan 5. Penangkapan 6. Penahanan 7. Pemblokiran 8. Izin/Persetujuan/Penetapan Ketua Pengadilan
8.	Anatomi Kasus	...
9.	Kebutuhan Anggaran Penyidikan	...

PPNS LH,	Atasan PPNS LH,
.....	
NIP.....	NIP.....

d. Format Tanda Terima SPDP

KOP SURAT INSTANSI	
TANDA TERIMA SPDP	
----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----.....-----	
NIP....., PPNS LH pada Kantor, bersama-sama dengan: -----	
1. Nama :; NIP.:	
2. Nama :; NIP.:	
Masing-masing bertugas di Kantor, berdasarkan:	
1. Laporan Kejadian Nomor:; tanggal;	
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:; tanggal;	
3. Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor:; tanggal	
telah menyerahkan SPDP kepada: -----	
Nama	:
NIK	:
Tempat/Tgl.Lahir	:
Jenis Kelamin	:
Kewarganegaraan	:
Agama	:
Pekerjaan	:
Alamat	:
Catatan: Jika yang menerima SPDP bukan terlapor	
SPDP disampaikan kepada Keluarga/Ketua Lingkungan/Ketua RT/Ketua RW/Pejabat Desa/Kelurahan *) dengan alasan bahwa	
Yang Menerima,	PPNS LH,
.....	
	NIP.
Saksi-Saksi	

1.

2.

)* Pilih salah satu

e. Format Surat Pemberitahuan Pengalihan Jenis Penahanan Tersangka

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran:
Perihal : Pemberitahuan Pengalihan
Jenis Penahanan Tersangka
a.n.....

Yth.
Tersangka/Keluarga Tersangka/Advokat Tersangka)*

di
.....

1. Dasar:
a. Pasal 108 ayat (11) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;
c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
e. Surat Perintah Penahanan Nomor:, tanggal;
f. Surat Perintah Pengalihan Jenis Penahanan Nomor:, tanggal

2. Dengan ini diberitahukan bahwa tersangka atas nama:
Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :
telah disetujui pengalihan jenis penahanannya dari di Jalan menjadi di Jalan

3. Pengalihan jenis penahanan ini terhitung mulai hari tanggal s/d hari tanggal

4. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP.

)*Pilih salah satu

f. Format Surat Pemberitahuan Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

.....20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/..../20....

Sifat : Penting

Lampiran:

Perihal : Surat Pemberitahuan Penangguhan Penahanan
a.n.....

Yth.

Tersangka/ Keluarga Tersangka/ Advokat Tersangka)*

di

.....

1. Rujukan:

a. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;

c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal

d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal

e. Surat Perintah Penangguhan Penahanan Nomor:, tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa berdasarkan permintaan Tersangka/Keluarga Tersangka/Advokat Tersangka)* mengenai penangguhan penahanan, perlu untuk melakukan penangguhan penahanan terhadap Tersangka:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Dalam perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup berupa
sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor
Tahun tentang

Penangguhan penahanan terhadap tersangka dilakukan berdasarkan
jaminan uang:

Jumlah :Rp..... (Rupiah)

Disimpan di : Panitera Pengadilan Negeri..... Jalan

Untuk penangguhan penahanan dengan jaminan orang, dilakukan oleh:

Nama :

NIK :

Tempat/Tgl. Lahir :

Jenis Kelamin :

Kewarganegaraan :

Agama :

Pekerjaan :

Alamat :

Hubungan dengan

Tersangka :

3. Penangguhan penahanan terhadap tersangka tersebut dilakukan sejak
tanggal
4. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan Yth.:

1. JAM Pidum Kejagung RI/Kepala Kejaksaan)*
2. Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri/Kepala Seksi Korwas PPNS
Polda)* ...

*) *Pilih salah satu*

g. Format Surat Pemberitahuan Penolakan Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
 "UNTUK KEADILAN"	
.....,..... Nomor : P-...../PPNSLH/.... /20..... Sifat : Penting Lampiran: Perihal : Pemberitahuan Penolakan Penangguhan Penahanan a.n	
Yth., Tersangka/Keluarga Tersangka/Advokat Tersangka di 	
1. Rujukan : a. Pasal 110 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; b. Pasal Undang-Undang Nomor..... Tahun tentang c. Laporan Kejadian Nomor :....., tanggal.....; d. Surat Perintah Penyidikan Nomor :....., tanggal.....; e. Surat permohonan penangguhan penahanan dari Tersangka/keluarga Tersangka/Advokat Tersangka Nomor:, tanggal	
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, dengan ini diberitahukan bahwa permintaan penangguhan penahanan terhadap Tersangka : Nama : NIK : Tempat/Tgl.Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat : Dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupasebagaimana dimaksud dalam Pasal....Undang-Undang Nomor.....Tahun.....tentang.....TIDAK DISETUJUI.	

3. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan Yth.:

- 1. Jampidum Kejagung RI/Kepala Kejaksaan)*
- 2. Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri/ Kepala Seksi Korwas PPNS Polda)*

*) *Pilih salah satu*

h. Format Surat Pemberitahuan Pencabutan Penangguhan Penahanan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

Nomor : P-...../PPNSLH/..../20.....

Sifat : Penting

Lampiran:

Perihal : Surat Pemberitahuan Pencabutan
Penangguhan Penahanan
a.n.....

Yth.,

Tersangka/ Keluarga Tersangka/ Advokat Tersangka
di

1. Rujukan:

- a. Pasal 110 ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
- d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
- e. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal ...;
- f. Surat Perintah Pencabutan Penangguhan Penahanan Nomor:, tanggal

2. Dengan ini diberitahukan bahwa pada hari tanggal tahun ... telah dilakukan pencabutan penangguhan penahanan terhadap Tersangka:

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :

Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	
dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang		
3. Demikian disampaikan untuk menjadi maklum.		
Atasan PPNS LH,		
..... NIP		
Tembusan Yth.:		
1. Jampidum Kejagung RI/Kepala Kejaksaan)*		
2. Kepala Biro Korwas PPNS Bareskrim Polri/ Kepala Seksi Korwas PPNS Polda)*		
*) <i>Pilih salah satu</i>		

i. Format Surat Pemberitahuan Pembantaran Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
"UNTUK KEADILAN"	
.....,.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/..../20....
Sifat	: Penting
Lampiran:	
Perihal	: Pemberitahuan Pembantaran Penahanan a.n.....
Yth., Tersangka/ Keluarga Tersangka/ Advokat Tersangka di	
1. Rujukan	
a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;	
b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang;	
c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal	
d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal	
e. Surat Perintah Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal	

j. Format Surat Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN” Nomor : S-...../PPNSLH/..../20.... Sifat : Segera Lampiran: Perihal : Pemberitahuan Pencabutan Pembantaran Penahanan a.n..... Yth., Tersangka/ Keluarga Tersangka/ Advokat Tersangka di ,.....	

1. Rujukan
 - a. Pasal 111 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - e. Surat Perintah Penahanan Nomor:/ tanggal
 - f. Surat Perintah Pencabutan Pembantaran Penahanan Nomor:, tanggal
2. Dengan ini diberitahukan bahwa telah dilakukan pencabutan pembantaran penahanan terhadap Tersangka:

Nama	:	
Tempat/Tgl.Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Telah dicabut Pembantaran penahanannya setelah yang bersangkutan dirawat inap (*opname*) di Rumah Sakit Jalan sampai dengan sembuh.
3. Selanjutnya yang bersangkutan Kembali ditahan di Rumah Tahanan Jalan Terhitung mulai hari tanggal untuk melanjutkan sisa masa penahanan.
4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

NIP

Tembusan Yth.:

1. Kepala Kejaksaan
2. Kepala Kepolisian.....

k. Format Surat Pengantar Penyerahan Berkas Perkara

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

.....,

Nomor : P-...../PPNSLH/..../20....

Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penyerahan berkas perkara a.n. Tersangka

Kepada Yth.,
Kepala Kejaksaan.....
Melalui Kepala Kepolisian
Di

-
1. Rujukan:
- a. Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) Pasal 61 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Laporan Kejadian Nomor: tanggal
 - c. Surat Perintah Penyidikan Nomor: tanggal.....;
 - d. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: tanggal

2. Berdasarkan rujukan tersebut di atas, bersama ini kami sampaikan Berkas Perkara Nomor tanggal dalam rangkap 2 (dua) atas nama Tersangka:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/ Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K	:	
Tempat/Tanggal Pendirian:		
dan/atau nomor anggaran		
dasar/akta pendirian/		
peraturan/dokumen/		
perjanjian/perubahan		
terakhir		
Tempat Kedudukan BU/K :		
Kebangsaan BU/K	:	
Jenis BU/K	:	
Bentuk BU/K	:	
Identitas Pengurus	:	
yang mewakili		

Dalam perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup berupa....yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor..... Tahun.....

3. Tersangka tersebut di atas ditahan/tidak ditahan
4. Barang-barang bukti yang tersebut dalam daftar barang bukti disimpan di
5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

	Atasan PPNS LH,
	 NIP
Tembusan Yth. :	
1.	
2.	
*) <i>Pilih salah satu</i>	

1. Format Tanda Terima Penyerahan Berkas Perkara

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>TANDA TERIMA</u> <u>PENYERAHAN BERKAS PERKARA</u>	
Yang bertanda tangan di bawah	
Nama	:
Pangkat	:
NIP	:
selaku PPNSLH pada tersebut di atas, telah melakukan penyerahan Berkas Perkara kepada Kejaksaan..... dalam perkara dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentangsebagai berikut : -----	
1. Berkas Perkara Nomor: BP/..... tanggal atas nama Tersangka	
2. Surat Penyerahan Berkas Perkara Nomor: tanggal	
Telah diterima oleh	
Nama	:
Nomor identitas	:
Jenis Kelamin	:
Tempat/tanggal lahir	:
Pekerjaan	:
Jabatan	:
Demikian Tanda Terima dibuat dengan sebenarnya.	
Yang Menerima	(tempat), (tanggal) Yang Menyerahkan,

(CAP/STEMPEL)

.....

.....
NIP.....

m. Format Surat Pengantar Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20.....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti

Kepada Yth.,
Kepala Kejaksaan.....
di
.....

1. Rujukan:
- a. Pasal 8 ayat (4), Pasal 59 ayat (8), Pasal 61 ayat (4), dan Pasal 62 ayat (6) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
 - b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
 - c. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal
 - d. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal
 - e. Berkas Perkara Nomor: tanggal

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut diatas, bersama ini kami serahkan tersangka atas nama:

Nama :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K :
Tempat/Tanggal Pendirian:
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/

perjanjian/perubahan terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :

Kebangsaan BU/K :

Jenis BU/K :

Bentuk BU/K :

Identitas Pengurus :

yang mewakili

Dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa.....yang terjadi di..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor..... Tahun..... tentang

3. Tersangka tersebut di atas tidak ditahan/ditahan)* di , beserta barang bukti berupa: -----
-----sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti -----

4. Apabila perkara tersebut telah mendapatkan putusan (vonis) Pengadilan, kiranya kepada kami dapat dikirimkan petikan Surat Keputusannya.

5. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....

NIP

Tembusan:

1.

2.

*) *Pilih salah satu*

n. Format Berita Acara Penyerahan Tersangka Dan Barang Bukti Tindak Pidana Bidang Lingkungan Hidup

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA

PENYERAHAN TERSANGKA DAN BARANG BUKTI

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
NIP., PPNS LH pada Kantor :

Bersama-sama dengan -----

- 1. Nama : ; NIP. :
- 2. Nama : ; NIP. :
- 3. dan seterusnya.

Telah menyerahkan dalam keadaan lengkap dan baik seorang Tersangka atas nama: -----

Nama :
NIK :
Tempat/Tgl.Lahir :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

bersama-sama dengan barang bukti sebagaimana terlampir dalam daftar barang bukti pada Berkas Perkara Nomor: tanggal --

Kepada Kejaksaan yang diterima oleh: -----

Nama :
Pekerjaan :
Pangkat / Jabatan :

Serah terima tersangka dilakukan di dengan disaksikan oleh : -----

Nama :
Pekerjaan/Jabatan :
Pangkat/Jabatan :

----- Demikian Berita Acara Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti ini dibuat dengan sebenar-benarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup ditandatangani di pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tersebut di atas. -----

Yang Menerima,

Yang Menyerahkan,

.....

.....
NIP.....

Saksi-saksi

1.

2.....

)* Pilih salah satu

o. Format Surat Perintah Penghentian Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
<u>SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PENYIDIKAN</u>	
Nomor : SP.PP-..../PPNSLH/...../20.....	
Pertimbangan	: Berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang dipersangkakan atau perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum atau tersangka meninggal dunia atau perkara telah kedaluwarsa, sehingga perlu mengeluarkan surat perintah ini.
Dasar	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal ... Undang-Undang Nomor..... Tahun Tentang; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor: Tanggal; 5. Resume hasil atas nama tersangka berupasebagaimana dimaksud dalam Pasal.... Undang-Undang Nomor Tahun Tentang; 6. Hasil Gelar perkara di tanggal; 7. Surat Putusan Pengadilan <i>(bila dihentikan demi hukum berdasarkan putusan pengadilan)</i> 8. Surat Keterangan Kematian a.n. <i>(bila Tersangka meninggal dunia)</i>
DIPERINTAHKAN	
Kepada	: 1. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 2. Nama : Pangkat/Golongan : Jabatan : 3. Dan seterusnya
Untuk	: 1. Menghentikan Penyidikan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/ Tgl. Lahir : Kewarganegaraan : Agama :

Pekerjaan :
Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K :
Tempat/Tanggal Pendirian :
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir
Tempat Kedudukan BU/K :
Kebangsaan BU/K :
Jenis BU/K :
Bentuk BU/K :
Identitas Pengurus :
yang mewakili

Dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup
berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
..... Undang-Undang Nomor Tahun
..... tentang terhitung mulai tanggal

Karena tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi
unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut
bukan merupakan tindak pidana/penyidikan
dihentikan demi hukum/tersangka meninggal
dunia/perkara telah kedaluwarsa)*.

- 2. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan s.d
.....
- 3. Dalam hal tersangka di tahan segera dikeluarkan dan
terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik
barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada
pihak yang berhak;

Selesai.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Penerima Perintah
PPNS LH,

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

.....
NIP

)* Pilih salah satu.

p. Format Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
SURAT KETETAPAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN	
Nomor : S.Tap-...../PP/PPNSLH/...../20.....	
Menimbang	: Bahwa berdasarkan hasil penyidikan terhadap tersangka, saksi, dan barang bukti, tidak ditemukan cukup bukti atas perbuatan pidana yang disangkakan atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, atau tersangka meninggal dunia atau perkara telah kedaluwarsa, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.
Mengingat	: 1. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang; 3. Surat Perintah Penyidikan Nomor tanggal; 4. Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal
Memperhatikan	: 1. Resume Hasil Penyidikan; 2. Laporan Hasil Gelar Perkara di tanggal 3. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor tanggal; 4. Surat Putusan Pengadilan (bila dihentikan demi hukum berdasarkan putusan pengadilan); 5. Surat Keterangan Kematian (bila Tersangka meninggal dunia)
MEMUTUSKAN	
Menetapkan	: 1. Menghentikan penyidikan terhadap Tersangka: Nama : NIK : Tempat/ Tgl. Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat :
Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb: Nama BU/K : Tempat/Tanggal Pendirian : dan/atau nomor anggaran	

dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir

Tempat Kedudukan BU/K :
Kebangsaan BU/K :
Jenis BU/K :
Bentuk BU/K :
Identitas Pengurus :
yang mewakili

Dalam perkara Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup
berupa yang terjadi di.....sebagaimana
dimaksud dalam Pasal Undang-Undang
Nomor Tahun tentang

2. Memberitahukan Penghentian Penyidikan kepada Kepala
Kepolisian dan/atau Kepala Kejaksaan
..... serta pihak-pihak terkait.

3. Dalam hal tersangka ditahan segera dikeluarkan dan
terhadap benda sitaan dikembalikan kepada pemilik
barang atau dari siapa benda itu disita atau kepada pihak
yang berhak.

4. Surat ketetapan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

q. Format Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

..... 20.....

Nomor : P-...../PPNSLH/...../20....
Sifat : Penting
Lampiran :
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Penyidikan a.n Tersangka....
.....

Yth.,

1. Kepala Kejaksaan.....

2. Kepala Kepolisian

Di

1. Dasar:

- a. Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2), Pasal 24 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
- c. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor: tanggal
- d. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:..... tanggal.....;

2. Sehubungan dengan hal di atas, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal, penyidikan atas dugaan Tindak Pidana bidang Lingkungan Hidup berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun..... tentang, atas nama Tersangka:

Nama	:	
NIK	:	
Tempat/ Tgl. Lahir	:	
Jenis Kelamin	:	
Kewarganegaraan	:	
Agama	:	
Pekerjaan	:	
Alamat	:	

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K	:	
Tempat/Tanggal Pendirian:		
dan/atau nomor anggaran		
dasar/akta pendirian/		
peraturan/dokumen/		
perjanjian/perubahan		
terakhir		
Tempat Kedudukan BU/K :		
Kebangsaan BU/K	:	
Jenis BU/K	:	
Bentuk BU/K	:	
Identitas Pengurus	:	
yang mewakili		

Telah dihentikan karena (tidak cukup bukti/perbuatan tidak memenuhi unsur pasal yang dipersangkakan/peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana/ penyidikan dihentikan demi hukum/tersangka meninggal dunia/perkara telah kedaluwarsa)*

3. Bersama ini pula kami lampirkan surat-surat administrasi penghentian penyidikan:

- a. Surat Perintah Penghentian Penyidikan Nomor:, tanggal.....;

- b. Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:, tanggal.....;
- c. Surat Perintah Pengeluaran Tahanan Nomor:, tanggal.....; (bila dilakukan penahanan);
- d. Berita Acara Pengeluaran Tahanan.
- e. Surat Putusan Pengadilan *(bila dihentikan demi hukum berdasarkan putusan pengadilan)*
- f. Surat Keterangan Kematian *(bila tersangka meninggal dunia)*

4. Demikian diberitahukan untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

NIP

Tembusan Yth.

1. Ketua Pengadilan Negeri.....;
2. Pelapor/Keluarga/Kuasa Hukum;
3. Terlapor/Keluarga/Kuasa Hukum.

r. Format Surat Ketetapan Pencabutan Penghentian Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

SURAT KETETAPAN PENCABUTAN PENGHENTIAN PENYIDIKAN

Nomor : S.Tap- /Cbt.PP/PPNSLH/.../20...

Menimbang : bahwa berdasarkan bukti-bukti baru yang ditemukan atau putusan praperadilan yang menyatakan penghentian penyidikan adalah tidak sah, sehingga perlu mengeluarkan surat ketetapan ini.

Dasar : 1. Pasal 7 ayat (1) huruf o, Pasal 158, Pasal 161, dan Pasal 163 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
2. Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang

Memperhatikan : 1. Laporan hasil gelar perkara tindak pidana bidang lingkungan hidup atas nama tersangka; (*jika ditemukan bukti baru*).
2. Surat Ketetapan Pengadilan Negeri Perihal: Putusan Praperadilan, Nomor:, tanggal; (*hasil Putusan Praperadilan untuk melanjutkan penyidikan*).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Mencabut Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan Nomor:,
tanggal

2. Melanjutkan penyidikan terhadap Tersangka;

Nama :
NIK :
Tempat/ Tgl. Lahir :
Alamat :
Jenis Kelamin :
Kewarganegaraan :
Agama :
Pekerjaan :
Alamat :

Catatan: jika dilakukan oleh badan usaha (BU) atau Korporasi (K) sbb:

Nama BU/K :
Tempat/Tanggal Pendirian :
dan/atau nomor anggaran
dasar/akta pendirian/
peraturan/dokumen/
perjanjian/perubahan
terakhir
Tempat Kedudukan BU/K :
Kebangsaan BU/K :
Jenis BU/K :
Bentuk BU/K :
Identitas Pengurus :
yang mewakili

3. Memberitahukan pencabutan Surat Ketetapan Penghentian
Penyidikan Nomor: kepada Kepala Kejaksaan..... melalui
Kepala Kepolisian, serta pihak-pihak yang terkait;

4. Surat ketetapan pencabutan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Dikeluarkan di :
Pada tanggal :

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

s. Format Surat Pelimpahan Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI	
“UNTUK KEADILAN”	
..... 20.....	
Nomor	: P-...../PPNSLH/.... /20.....
Sifat	: Penting
Lampiran	:
Perihal	: Pelimpahan Penyidikan terhadap Tersangka a.n
Yth.	
di.	
1. Rujukan:	
a.	Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
b.	Pasal Undang-Undang Nomor Tahun tentang
c.	Laporan Kejadian Nomor, tanggal
d.	Laporan Hasil Gelar Perkara di tanggal
2.	Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi, Ahli dan Tersangka serta barang bukti, didapat fakta bahwa Tersangka atas nama telah melakukan Tindak Pidana bidang berupa yang terjadi di.....sebagaimana dimaksud dalam Pasal, dan juga Pasal Undang-Undang Nomor: Tahun tentang (<i>Undang-Undang lain diluar kewenangan PPNS LH</i>).
3.	Sehubungan dengan dasar tersebut di atas, bersama ini kami serahkan proses penyidikan dan menyerahkan tanggung jawab tersangka atas nama: Nama : NIK : Tempat/ Tgl Lahir : Jenis Kelamin : Kewarganegaraan : Agama : Pekerjaan : Alamat :
4.	Tersangka dilakukan/tidak dilakukan penahanan)* di beserta Barang bukti sebagaimana terlampir dalam Daftar Barang Bukti.
5.	Sebagai bahan pertimbangan, berikut dilampirkan administrasi Penyidikan: a.; b.; c. dst.

6. Demikian untuk menjadi maklum.

Atasan PPNS LH,

.....
NIP

Tembusan:

1.
2.

)* Pilih salah satu

t. Format Berita Acara Pelimpahan Penyidikan

KOP SURAT INSTANSI

“UNTUK KEADILAN”

BERITA ACARA PELIMPAHAN PENYIDIKAN

----- Pada hari ini, tanggal bulan tahun, pukul WIB/WITA/WIT)*, saya -----
NIP., PPNS LH pada Kantor

Telah menyerahkan penyidikan selanjutnya terhadap Tersangka dalam perkara Tindak Pidana bidang berupa sebagaimana dimaksud dalam Pasal Undang-Undang Nomor Tahun untuk kelancaran proses penyidikan kepada: -----
Nama :
NRP/NIP)* :
Pangkat/ Jabatan :

Beserta kelengkapan administrasi penyidikan telah dilakukan, yaitu: -----
-

1. Laporan Kejadian Nomor:, tanggal;
2. Surat Perintah Penyidikan Nomor:, tanggal;
3. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor:, tanggal;
4. Berita Acara Pemeriksaan Saksi/Ahli/Tersangka; -----
5. Barang-barang bukti yang disita sebagaimana tercantum dalam daftar barang bukti terlampir; -----
6. Dan seterusnya. -----

Serah terima dilakukan di di Jalan dengan cara kedua belah pihak meneliti terlebih dahulu kelengkapan penyerahan penyidikan sebagaimana tersebut di atas dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi yang masing-masing mewakili instansi/ kantor penyidik yaitu: -----

1. Nama :

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP/KEPALA
BADAN PENGENDALIAN LINGKUNGAN
HIDUP REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOH JUMHUR HIDAYAT